

Tesis

**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA *ONLINE* OLEH SUB BAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NURUL BAYYINAH MUHRIM
E022191024**



**SEKOLAH PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA *ONLINE* OLEH SUB BAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan
Oleh :

Nurul Bayyinah Muhrim
E022191024

Telah diperiksa dan siap untuk dipertahankan dihadapan tim penguji
pada tanggal, Juni 2021

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si


Dr. Arianto, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin


Dr. Muhammad Farid, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Bayyinah Muhrim
Nomor Pokok : E022191024
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Analisis Penggunaan Media Online oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021

Yang menyatakan

Nurul Bayyinah Muhrim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. karena atas rahmat, inayah, dan kuasa- Nya sehingga penulis dengan segala usaha dan perjuangan dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Analisis Penggunaan Media Online oleh Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.”.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata II pada Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, bantuan dan doa restu dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde selaku pembimbing I dan Dr. Arianto, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama proses bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Muh. Iqbal Sultan, M.Si, Dr. Hasrullah, MA, dan Dr. Ir. Rhiza Samsoe’oed Sadjad, MS.EE selaku tim penguji yang senantiasa memberikan arahan, koreksi, dan saran yang membangun untuk

penyempurnaan tesis ini.

3. Dr. H. Muhammad Farid, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Komunikasi Universitas Hasanuddin dengan tulus memberikan arahan dan motivasi selama penulis menyelesaikan pendidikan.
4. Para dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan segala jerih payah membimbing dan memandu perkuliahan sehingga menambah wawasan penulis.
5. Jajaran pengelola Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan maksimal dalam administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis.
6. Kedua orang tua, saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan materil selama penulis menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Hasanuddin yang berjuang bersama dalam proses perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

Penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekeliruan

dan ketidaksempurnaan dari segi substansi maupun metodologi. Penulis berharap masukan konstruktif untuk tulisan ini, akan hadir tulisan yang lebih baik. Semoga Allah swt. memberi perlindungan dan kebaikan kepada semua pihak yang berperan dalam tesis ini.

Makassar, Juni 2021

Penulis,

Nurul Bayyinah Muhrim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Konsep.....	10
1. Public Relation dan Humas Pemerintah.....	10
2. Media <i>Online</i> di Era Digital.....	27
B. Kajian Teori.....	41
1. Teori <i>Boundary Spanning</i> Public Relations.....	41
2. Teori <i>Cyber</i> Public Relation.....	44
C. Penelitian Terdahulu.....	46
D. Kerangka Pikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengambilan Data dan Jumlah Informan.....	57
E. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Profil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	64
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	66
B. Hasil Penelitian.....	71
C. Pembahasan	
1. Pengelolaan Publikasi Berita Melalui Media <i>Online</i> oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	102

2. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Tidak Memaksimalkan Publikasi pada Media *Online*....
108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan118
B. Saran120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

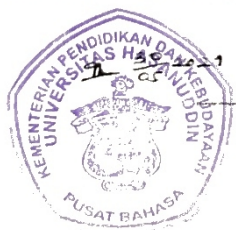
NURUL BAYYINAH MUHRIM. *Analisis Penggunaan Media Daring oleh Subbagian Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Andi Alimuddin Unde dan Arianto).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis pengelolaan publikasi berita oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Media daring di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan (2) mengetahui dan menganalisis penyebab Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi di media daring pada era informasi digital.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Urip Sumahardjo No. 59 Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) proses pengelolaan publikasi berita melalui media daring, Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengklasifikasi menjadi dua bagian, yakni bagian isi pemberitaan (publikasi) media daring humas dan bagian desain berita publikasi daring humas. Proses pengelolaan publikasi berita media daring telah melalui perencanaan dan penerapan yang matang, namun belum mencapai tujuan yang diharapkan Humas DPRD Sulawesi Selatan dan (2) Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi di media daring disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (a) Humas hanya sebatas fasilitator, (b) kurangnya keterampilan menulis, (c) fasilitas penunjang kurang memadai, dan (d) minimnya anggaran. Hal-hal penyebab Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan pemberitaan secara umum masih didominasi oleh faktor-faktor internal sehingga perlu pembenahan terhadap hal tersebut agar Humas dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik.

Kata kunci: humas pemerintah, sekretariat dprd, media daring



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini sangat memberikan dampak terhadap pesatnya perkembangan teknologi yang ditandai dengan meningkatnya arus informasi dan komunikasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, yakni melalui keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kebutuhan layanan informasi publik melalui media *online*. Keberadaan internet atau media *online* memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. Dalam sebuah data yang penulis kutip dari Kumparan.com bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175.4 juta jiwa dari total penduduk sebesar 2721.1 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet dalam kehidupannya. Berdasarkan data di atas, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi segala hal, termasuk cara kerja Public Relations (PR) dan perkembangan perusahaan. Melalui

teknologi internet, tanpa harus bertemu dengan jarak beribu-ribu mil pun Public Relations dapat melakukan komunikasi dengan publiknya (Hidayat, 2014: 94).

Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi internet untuk mempermudah kegiatan Public Relations melalui dunia maya atau yang disebut PR Digital. Tidak hanya perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet untuk mempermudah kegiatan Public Relations. Namun, Public Relations (Humas) pemerintah juga turut memanfaatkan teknologi internet sebagai jembatan antara instansi dengan masyarakat dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Sebagai bentuk dari keterbukaan informasi tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan gebrakan pemerintah sebagai komitmen untuk melindungi dan menjamin hak publik atas berbagai informasi publik (Sari, 2012:95). Adanya undang-undang tersebut memposisikan Humas pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi publik.

Humas pemerintah memiliki beberapa tugas utama menurut Millet (Dalam Sari, 2012) antara lain mempelajari keinginan publik, menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah serta mencoba menciptakan citra baik pemerintah di mata publik. Untuk mewujudkan tugas ini maka sudah sewajarnya Humas memanfaatkan segala jenis saluran tersedia khususnya media *online*.

Humas pemerintah pada umumnya bertugas sebagai komunikator dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Humas pemerintah harus menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang diinformasikan tersebut diantaranya kebijakan baru, prestasi ataupun pencapaian pemerintah itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat membangun citra positif instansi terkait dan diharapkan dapat membentuk opini positif publik terhadap kinerja pemerintahan. Pengembangan media massa ke media *online* sebagai sarana untuk penyebaran informasi ke publik juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pekerjaan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi ada empat belas poin. Empat belas poin itu yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan melakukan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- g. Mengoordinasikan dan merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. Mengoordinasikan dan menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- i. Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan DPRD;
- j. Mengoordinasikan dan merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Humas dan Protokol pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berfokus pada dua hal yaitu memberikan informasi dan melakukan publikasi kegiatan DPRD.

Sudah menjadi perhatian umum bahwa media *online* menjadi salah satu kunci untuk dapat menjangkau masyarakat selain menggunakan cara "lama" seperti pemberitaan koran, televisi, radio dan spanduk/baliho.

Berdasarkan olah data sekunder dan observasi awal tercatat beberapa media *online* berposko di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu SulselEkspress.com, IniPasti.com, SulselSatu.com. Djournalist.com, Rakyatku.com, Trotoar.id, IniKata.com, MitraPol, dan BeritaSulsel serta website yang dikelola Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut rincian media *online* serta jumlah berita yang dipublikasikan sepanjang bulan Juli - September 2020.

No.	Media	Jumlah Berita Juli–September 2020
1.	SulselEkspress.com	10
2.	IniPasti.com	17
3.	SulselSatu.com	18
4.	Djournalist.com	7
5.	Rakyatku.com	8
6.	Trotoar.id	24
7.	IniKata.com	8
8.	MitraPol	8
9.	Website DPRD Sulsel	8

Sumber: Olah data oleh Penulis (Juli-September 2020)

Berdasarkan data di atas, penulis melihat bahwa jumlah publikasi sekretariat yang menjadi tugas dan fungsi utama Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih lemah. Kedua adalah terjadi ketidakseimbangan jumlah publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beberapa di media *online*. Ada lima media *online* yang memuat kurang dari sepuluh berita selama tiga bulan terakhir termasuk website DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pantauan penulis, lima portal media *online* yang memuat kurang dari sepuluh berita tersebut masih aktif namun karena sumber daya wartawan yang kurang sehingga portal media tersebut hanya mengandalkan rilis berita kiriman dari Humas Pemerintah. Humas DPRD Sulawesi Selatan kurang aktif dalam membagikan bahan publikasi sehingga pemberitaan seputar DPRD Sulawesi Selatan menjadi tidak maksimal di beberapa media *online*. Hal ini tentu menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berita yang sering muncul menjadi headline adalah pada saat ada aksi, demo, maupun sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berita mengenai kegiatan kedewanan seperti reses, koordinasi dan kunjungan kerja belum begitu menjadi perhatian. Penulis melihat diperlukan keaktifan Humas agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dalam menyediakan bahan informasi dan publikasi tentang kegiatan kedewanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan kedewanan seperti reses, koordinasi, komunikasi dalam dan luar

daerah serta kunjungan kerja dapat menjadi bahan liputan untuk menunjukkan kinerja kedewanan.

Melihat penjabaran di atas maka dapat ditarik bahwa Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu memahami dengan baik tugasnya sebelum melakukan implementasi program kerja sesuai dengan yang tertuang dalam Tugas Pokok Humas DPRD. Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat bahwa masih diperlukan beberapa pembenahan dalam pengelolaan pemanfaatan media *online*. Sehingga penulis berkeinginan untuk menjadikah hal tersebut sebagai penelitian penulis. Untuk itu penulis ingin meneliti tentang **Analisis Penggunaan Media *Online* oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Humas dalam mengelola publikasi berita melalui media *online* Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Mengapa Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online* di Era Digital Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat:

1. Mengetahui dan menganalisis Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola publikasi berita melalui Media *Online* pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui dan menganalisis penyebab Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online* di Era Digital Informasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan ilmu komunikasi, khususnya ilmu komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan program kerja oleh Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Public Relations dan Humas Pemerintahan

Public Relations dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Hubungan Masyarakat atau Humas. Biasanya Humas sering digunakan dalam instansi pemerintah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pengertian Humas dan Public Relations, keduanya sama dari segi pengertian, proses, tujuan, fungsi dan kegiatannya. Semua orang percaya bahwa definisi dari Public Relations/Humas bisa saja berbeda – beda arti bagi masing – masing pihak. Ada yang melihatnya dari segi komunikasi, publikasi, manajemen, pemasaran atau periklanan, begitu kompleksnya.

Penjelasan menurut Grunig (1989) dalam Kriyantono (2014) menyatakan bahwa Public Relations adalah penggunaan komunikasi untuk memanipulasi publik demi kepentingan organisasi. Barney (1955) dalam Morissan (2009) mendeskripsikan PR sebagai "*Inducing the public to have understanding for and goodwill* (Membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta niat baik).

Demikian pula, Cutlip-Centre-Broom (2006) mendefinisikan PR sebagai berikut:

the planned effort to influence opinion through good character and responsible performance, based on mutually satisfactory two-way communication (Usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan). Public Relations adalah penggunaan komunikasi yang terencana untuk membujuk publik agar mendukung organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang memuaskan.

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam menghadapi masalah, dan bertindak sebagai peringatan dini dalam mengantisipasi penggunaan teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama kegiatan kehumasan (Rex Harlow Dalam Iksan dan Mandalia, 2015).

Kegiatan Public Relations pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik komunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah (*two way communication*) antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya. Setelah melakukan kegiatan komunikasi tersebut, pihak Humas menganalisa untuk mengetahui efeknya atau feed back, apakah berdampak baik terhadap citra, atau sebaliknya menjadidi negatif sehingga kurang menguntungkan posisi organisasi atau lembaga bersangkutan di mata masyarakat (Ruslan, 1999:19).

Definisi Public Relations yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar, menurut *International Public Relations Associations* (IPRA) terbitan gold paper N0 4 dengan judul *A model for public relations education for*

profesional practice, walaupun terdapat perbedaan, tetapi mengandung kesamaan arti diantaranya :

- a. Public Relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian dan citra baik di masyarakat.
- b. Sasaran Public Relations adalah berupaya ciptakan opini publik yang favorable dan menguntungkan semua pihak.
- c. Public Relations merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung manajemen untuk menciptakan tujuan yang spesifik dari organisasi atau lembaga.
- d. Public Relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dengan pihak masyarakat melalui suatu proses timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif (Ruslan, 2005 :8).

Sudah selayaknya seorang praktisi Public Relations memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan organisasinya. Menurut Smith (2005) praktisi Public Relations sewajarnya mampu menganalisis tiga hal yaitu:

- 1) Menganalisis situasi yaitu menganalisa perencanaan, siapa klien kita, siapa *supervisor*, siapa orang-orang penting dalam perusahaan dan siapa pengambil kebijakan tertinggi. Artinya

humas harus mengetahui kepada siapa dia akan bertanya jika terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan dan siapa yang kredibel untuk menjelaskan kepada publiknya;

- 2) Menganalisis organisasi yaitu memahami tiga aspek organisasi antara lain (a). Lingkungan internal (visi dan misi, kinerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi); (b). Memahami persepsi publik terhadap organisasi; dan (c). Lingkungan eksternal antara lain saingan, lawan serta pendukung;
- 3) Menganalisis siapa publik kita. Perlu dipahami bahwa organisasi kita berinteraksi dengan berbagai jenis publik. Sehingga, kita harus menganalisa *key public* yang penting untuk kita 'pegang' dalam menghadapi isu tertentu.

Dengan memiliki kemampuan dalam menganalisa situasi, organisasi dan publik maka harapannya adalah petugas humas dapat memberikan solusi yang jitu dalam menghadapi situasi tertentu. Untuk dapat melakukan analisa yang baik humas harus dapat menganalisa isu yang beredar di publik. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam (Djoenarsih, Sunarjo, 1984 :19) mengatakan bahwa publik berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan, berinteraksi secara tidak langsung melalui media komunikasi, baik komunikasi secara umum misalnya pembicaraan secara pribadi, desas-desus, melalui media komunikasi seperti pers, radio, televisi, film dan sebagainya. Publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi

baik secara internal maupun eksternal (Frank Jefkins yang dikutip oleh (Fajar, 2009 : 56-57). Sedangkan Zawawi (2000) memiliki pengertian sederhana mengenai publik yakni sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama. Menurut Cutlip-Centre-Broom (2006) bahwa ada empat peran humas dalam organisasi yaitu;

- 1) Teknisi Komunikasi. Deskripsi kerja teknisi komunikasi lebih kepada jurnalistik. Teknisi komunikasi memiliki tugas utama dalam menulis news release, mengembangkan isi web dan menangani media. Namun, kelemahannya teknisi memiliki posisi sebagai pelaksana di lapangan dia tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan;
- 2) Fasilitator Komunikasi. Deskripsi pekerjaan fasilitator komunikasi adalah pendengar dan perantara komunikasi antara organisasi dan publiknya. Selain sebagai pendengar mereka juga memainkan fungsi sebagai Interpreter dan mediator dalam organisasi. Posisi fasilitator komunikasi berada ditengah-tengah sebagai penghubung organisasi dan publiknya;
- 3) Fasilitator Pemecah Masalah. Deskripsi pekerjaan mereka adalah berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Fasilitator pemecah masalah memainkan peran penting dalam menganalisa situasi dan masalah karena mereka merupakan orang yang paling dekat dengan kebijakan, produk, prosedur dan tindakan organisasi;

- 4) *Expert Prescriber*. Mereka berperan sebagai ahli dan memiliki otoritas dalam persoalan kehumasan dan mampu untuk memberikan solusi. Para ahli ini dianggap dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dengan organisasi dalam setiap aspek pekerjaan.

Praktisi humas diharapkan dapat menganalisa perannya dalam organisasi. Dengan mengetahui perannya dalam organisasi tidak akan terjadi tumpang tindih. Dengan memahami perannya maka praktisi humas dapat melaksanakan tugasnya sesuai koridor yang telah ditentukan. Sudah selayaknya seorang praktisi kehumasan memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan organisasinya. Public Relations sewajarnya mampu menganalisis tiga hal menurut Smith (2005) yaitu:

- 1) Menganalisis situasi yaitu menganalisa perencanaan, siapa klien kita, siapa supervisor, siapa orang-orang penting dalam perusahaan dan siapa pengambil kebijakan tertinggi. Artinya humas harus mengetahui kepada siapa dia akan bertanya jika terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan dan siapa yang kredibel untuk menjelaskan kepada publiknya;
- 2) Menganalisis organisasi yaitu memahami tiga aspek organisasi antara lain (1). Lingkungan internal (visi dan misi, kinerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi); (2). Memahami persepsi publik terhadap organisasi; dan (3). Lingkungan eksternal antara lain saingan, lawan serta pendukung;

- 3) Menganalisis siapa publik kita. Perlu dipahami bahwa organisasi kita berinteraksi dengan berbagai jenis publik. Sehingga, kita harus menganalisa *key public* yang penting untuk kita 'pegang' dalam menghadapi isu tertentu.

Dengan memiliki kemampuan dalam menganalisa situasi, organisasi dan publik maka harapannya adalah petugas humas dapat memberikan solusi yang jitu dalam menghadapi situasi tertentu. Untuk dapat melakukan analisa yang baik humas harus dapat menganalisa isu yang beredar di publik.

Dikutip dari (Soemirat, Ardianto , 2002 : 15), publik dalam Public Relations dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Publik Internal dan publik eksternal

Internal Publik yaitu publik yang berada di dalam organisasi/ perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Eksternal publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen, pelanggan, komunitas dan pemasok.

2. Publik primer, sekunder, dan marginal

Publik primer bisa sangat membantu atau merintangi upaya suatu perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu

penting. Contoh, anggota *Federal Reserve Board of Governor* (dewan gubernur cadangan federal) yang ikut mengatur masalah perbankan, menjadi publik primer untuk sebuah bank yang menunggu rotasi secara teratur, dimana anggota legislatif dan masyarakat menjadi publik sekundernya

3. Publik tradisional dan publik masa depan

Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa/pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen dan pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa depan.

4. *Proponents, opponent, dan uncommitted*

Diantara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan (*opponents*), yang memihak (*proponents*) dan ada yang tidak peduli (*uncommitted*). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan (Seitel, 1992:13-14).

5. *Silent majority dan vocal minority*

Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan *complaint* (keluhan) atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal (aktif) dan yang *silent* (pasif). Publik penulis di surat kabar umumnya adalah *the vocal minority*, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tak banyak. Sedangkan mayoritas

pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya (Kasali, 1994:11).

Penjelasan Wilcox dan Cameroon (2009) menjabarkan beberapa fungsi dari Public Relations yaitu:

- 1) *Counseling*. Humas diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan dan hubungan komunikasi.
- 2) *Research*. Humas diharapkan dapat memastikan sikap dan perilaku masyarakat. Riset dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kesepahaman atau mempengaruhi publik.
- 3) *Media Relations*. Humas diharapkan dapat membangun hubungan dengan media massa dalam mencari publisitas dan memunculkan perhatian terhadap organisasi.
- 4) *Member Relations*. Humas diharapkan dapat merespon terhadap sebuah isu serta menginformasikan dan memotivasi karyawan perusahaan.
- 5) *Community Relations*. Humas diharapkan dapat merancang sebuah aktifitas yang melibatkan komunitas guna menjaga hubungan yang baik antara organisasi dengan komunitas sekitar.
- 6) *Public Affairs*. Humas diharapkan dapat mengembangkan keterlibatan terhadap kebijakan public agar organisasi dapat beradaptasi dengan ekspektasi public.

- 7) *Government Affairs*. Humas diharapkan dapat berhubungan langsung dengan legislative atau pembuat kebijakan.
- 8) *Issues Management*. Humas diharapkan dapat mengidentifikasi isu dan menjaga agar isu tersebut tidak mempengaruhi organisasi.
- 9) *Financial Management*. Humas diharapkan dapat membangun dan menjaga kepercayaan investor.
- 10) *Industry Relations*. Humas diharapkan dapat menjaga hubungan dengan organisasi lain atau hubungan dagang lainnya.
- 11) *Fund Raising*. Humas diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara finansial terhadap organisasi.
- 12) *Multicultural Relationship*. Humas diharapkan dapat menghubungkan individu atau grup dalam berbagai grup budaya berbeda.
- 13) *Special Event*. Mendorong ketertarikan terhadap individu, kelompok atau organisasi dengan metode even yang direncanakan. Kegiatan juga direncanakan agar mereka dapat berinteraksi dengan publik.
- 14) *Marketing Communication*. Kombinasi dari berbagai aktivitas dengan tujuan menjual produk, jasa atau ide termasuk iklan, publisitas, promosi dan even khusus.

Public Relations diharapkan dapat memperaktekan fungsi-fungsi tersebut dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. Publik memiliki tanggung jawab terhadap isu publik eksternal dan internal menurut Tench dan Yeomans (2006). Untuk menganalisa isu publik eksternal dapat dibagi dua yaitu isu makro dan isu task. Isu makro dapat dianalisa menggunakan analisa PEST. Sedangkan isu task biasanya lebih terkontrol contohnya adalah konsumen dan *Shareholders*.

Politik - Situasi politik antar Negara - Perubahan rezim - Kebijakan ekonomi	Ekonomi - Suku bunga - Nilai mata uang - Nilai Devisa Negara
Sosial - Pola hidup - Perubahan demografi - Pola belanja masyarakat	Teknologi - Teknologi baru - Biaya riset dan pengembangan - Dampak teknologi

Diadaptasi dari Analisa PEST, Buku *Exploring PR*

Selain isu eksternal, isu yang dihadapi oleh humas adalah isu internal. Isu internal ini berkuat dengan bentuk organisasi dan bidang dimana dia beroperasi. Maksud dari bentuk adalah jika dia organisasi yang kecil yang hanya beroperasi pada satu wilayah maka tantangan komunikasi yang dihadapi relatif dapat diprediksi sedangkan bidang organisasi adalah sektor dimana dia berdiri.

Penanganan kehumasan untuk perusahaan makanan berbeda dengan penanganan kehumasan organisasi yang bergerak di bidang jasa

ataupun keuangan. Beberapa isu internal yang dapat dilihat pada buku ini antara lain sektor organisasi itu bergerak, ukuran dari perusahaan tersebut, perkembangan dan budaya organisasi.

Empat model kehumasan menurut Grunig dan Hunt (Dalam Waddington, 2013), yaitu:

1. *Press Agency*

Pada abad ke-19, agen pers bekerja untuk mempengaruhi opini publik dengan menciptakan berita. Agen pers berinvestasi waktu dalam penelitian namun kurang dalam pembahasan etika. Tujuannya adalah manipulasi. Menekan pada praktek PR yang fokus pada upaya promosi, publisitas, dan propaganda publik (Lattimore dkk.2010:63). Praktisi PR dalam model ini dihalalkan untuk melakukan segala cara demi mendongkrak nama organisasi atau orang yang diwakilinya.

2. *Public Information*

Model PR ini mulai muncul awal abad ke-20. yang bergeser ke arah yang lebih benar dan tepat dalam berkomunikasi. Tetapi tidak lebih dari mendistribusikan informasi. Berbeda dengan model pertama, model ini tidak digunakan untuk memperlak publik dan menekan pada pemberian informasi yang jujur (Butterick,2012:32). Komunikasi ini lebih mengarah kepada komunikasi satu arah.

3. *Two Way Communication Asymmetrical*

Model komunikasi ini adalah model komunikasi dua arah. Tujuannya ialah keseimbangannya. Model ini tentang persuasi yang dapat

memicu transaksi hingga popularitas dalam pemasaran. Dengan model ini tetap berusaha untuk memposisikan publik sebagai pihak yang harus berubah sesuai dengan keinginan organisasi dan bukan sebaliknya (Lattimore,dkk. 2010:64).

4. *Two Way Communication Symetrical*

Model komunikasi ini menekan pada adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri. Model inilah yang kemudian diklaim oleh Grunig dan Hunt sebagai model yang paling baik yang dapat menentukan kesuksesan praktek PR dalam Organisasi. (Butterick, 2012:34)

Model	Tipe Komunikasi	Karakteristik
Press Agency	Komunikasi satu arah	Menggunakan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak agar bertindak sesuai keinginan organisasi.
Public Information	Komunikasi satu arah	Melakukan teknik komunikasi satu arah untuk mendistribusikan informasi.
Two-Way Asymmetrical	Komunikasi dua arah	Menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak agar bertindak sesuai keinginan organisasi.
Two-Way Symmetrical	Komunikasi dua arah	Menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi, menyelesaikan konflik dan menumbuhkan kesepahaman antar organisasi.

Sumber: Model PR Grunig dan Hunt dalam Weddington, 2013

Pemahaman Public Relations secara umum. Humas dalam tata pemerintahan. Public Relations atau Humas adalah penggunaan komunikasi yang terencana untuk membujuk publik agar mendukung

organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang memuaskan. Definisi ini juga berlaku bagi Humas pemerintah namun dalam prakteknya yang membedakan fungsi Humas swasta dan pemerintah adalah unsur komersial (Ruslan dalam Sari, 2012).

Humas pemerintah merupakan penyambung antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Crespo dan Echart (2011) performa pemerintah dapat diberikan oleh publik melalui kapasitas pemerintah dalam menghadapi persoalan dan mengelola kebijakan publik. Sehingga Grunig dan Hunt (1999) menyarankan agar pemerintah menjaga kepercayaan, kepuasan, dan komunal yang merupakan pekerjaan seorang Humas.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 6 tahun 2014 pasal satu menyebutkan bahwa pranata Humas adalah pegawai negeri sipil yang melakukan pekerjaan pelayanan informasi kehumasn. Pekerjaan pelayanan informasi dan kehumasan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pranata humas, mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pedoman tata kelola Humas pemerintah bahwa kehumasan harus melaksanakan fungsi manajemen informasi dan komunikasi secara persuasif, efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan hubungan

harmonis dengan khalayak agar citra pemerintah menjadi positif. Untuk melakukan hal tersebut Humas pemerintah harus dapat menganalisa situasi, membuat strategi, melakukan implementasi dan evaluasi yang berpegang pada etika kehumasan (Permenpan RB No. 30 Tahun 2011).

Pedoman umum Humas pemerintah juga menuliskan pada pasal 21 bahwa Humas pemerintah harus memiliki kualifikasi antara lain kemampuan untuk berbicara persuasif dan menulis efektif. Memiliki pemahaman media berita, keuangan dan manajerial. Humas pemerintah juga harus cakap dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan dan menangani publik. Serta berpikir logis, kreatif dan beretika tinggi (Permenpan RB No.8 Tahun 2007).

Selanjutnya, Humas harus melakukan tugas dan fungsinya dengan bermitra bersama pemangku kepentingan seperti:

- a. Kelompok media meliputi jurnalis, media cetak, elektronik dan *online* serta pengusaha media dan organisasi profesi media.
- b. Kelompok internal antara lain Pimpinan dan Pegawai pemerintah
- c. Kelompok eksternal yaitu masyarakat
- d. Kelompok lembaga pemerintah seperti kementerian, BUMN/BUMD, TNI/Polri.
- e. Lembaga penyelenggaran negara antara lain legislatif, yudikatif, dan sebagainya.

- f. Kelompok lembaga swadaya masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga internasional.

Menurut John D. Millet (Dalam Sari, 2012) Humas pemerintah memiliki tugas utama antara lain;

- a. Mempelajari dan mengamati tentang hasrat, keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*);
- b. Memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan publiknya (*advising the public about what should desire*);
- c. Mengusahakan agar terjadinya hubungan yang memuaskan antara publik dengan aparat pemerintah (*ensuring satisfactory between public and government official*);
- d. Memberikan informasi dan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (*informing and explaining about what agency is doing*).

Effendy (Dalam Aras, 2014) menyatakan bahwa Humas pemerintah harus dapat menyebarluaskan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik masyarakat mengenai perundang-undangan

dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat tersebut. Senada dengan hal tersebut Ruslan (Dalam Aras, 2014) menyatakan bahwa Humas harus memperlancar jalan interaksi dan penyebaran informasi mengenai pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pers media cetak maupun elektronik.

Salah satu tantangan dalam implementasi fungsi Humas yaitu *informed and explaining to public* serta menjaga relasi baik antara publik dan pemerintah dijelaskan oleh Juariyah (2016) dalam *Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication* menerbitkan jurnal tentang tantangan Humas dalam menghadapi era web 2.0. Humas perlu memahami bahwa perkembangan teknologi akan berdampak pada implementasi tugas pokok dan fungsi humas.

Perkembangan teknologi dengan munculnya internet yang disusul dengan berkembangnya media sosial sehingga manusia semakin mudah berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang berkembang menjadi tidak terkendali. Disinilah peran humas diharapkan dapat mengatur arus informasi tersebut melalui saluran-saluran yang dimiliki serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Gejala tantangan web 2.0 terhadap tugas dan fungsi pemerintah telah dihadapi dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang mengharuskan

humas menjadi lebih cermat dan lebih tepat dalam memilih saluran. Sejak 2003 sebenarnya pemerintah telah memberlakukan status awas terhadap Web 2.0 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerapan *e-Government*.

Namun, penerapan respon pemerintah tersebut lambat untuk diaplikasikan sampai kedaerah. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah masih belum menganggap *web 2.0* sebagai tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dapat ditunjukkan bahwa tindak lanjut dari Inpres ini muncul setelah lima tahun yakni Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi publik tahun 2008.

Sehingga, menjadi perhatian bahwa tugas dan fungsi Humas tidak lagi hanya dokumentasi dan kliping melainkan memberikan informasi dan membangun dan menjadi relasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah melalui pemanfaatan *web 2.0*. seperti yang tertuang dalam Permenpan RB No. 31 Tahun 2011 tentang infrastruktur Humas pemerintah yang menempatkan internet dan website sebagai komponen penting dalam pedoman pelaksanaan tugas Humas pemerintah.

2. Media *Online* di Era Digital

New Media (Media Baru) merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy. Media baru adalah teori yang membahas mengenai perkembangan media. *New Media* atau yang sering disebut juga media *online* didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang

termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital (Creeber dan Martin, 2009). Definisi lain media *online* adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011).

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang *complex* dan *fleksibel* yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media karena media ini adalah sesuatu yang terus selalu berkembang dari media zaman dahulu (*old media*) sampai sekarang yang sudah menggunakan digital (modern media/new media).

Selama tahun 2000, internet telah memasuki fase yang disebut *web 2.0*. (*web two point-oh*), dimana semua menjadi lebih interaktif dan telah menjadi area untuk semua orang, tidak hanya milik beberapa pihak saja. Semua orang saat ini dapat langsung mengambil peran dan menaruh apapun kedalam internet.

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (*new media*). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan,

memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998:110). Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image sendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet (McQuail, 2009: 28-29).

Internet adalah sebuah medium terbaru yang mengkonvergensi seluruh karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu menurut Septiawan Santana Kurnia dalam bukunya *Jurnalisme Kontemporer* (2005). Apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, namun perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas *storage* dan fasilitas mengakses informasi, densitas (kepekatan atau kepadatan) dan kekayaan arus-arus informasi, jumlah fungsionalitas atau intelijen yang dapat ditransfer. Jadi menurut Santana, titik esensinya adalah bahwa keunikan internet terletak pada esensinya sebagai sebuah medium (Setyani, 2013:5).

Untuk mengakses Internet, seseorang membutuhkan koneksi Internet. Internet yang dianggap sebagai gabungan dari beberapa bentuk

media dan fasilitas *email*, *website*, *newsgroup*, *e-commerce* dan sebagainya (Lievrouw, 2006:221).

Peneliti komunikasi Carrie Heeter (1988) memaparkan dimensi-dimensi interaktivitas yang digunakan untuk mengklarifikasi media, yaitu:

1. Dimensi kompleksitas dari pilihan yang tersedia. Maksudnya adalah berapa banyak pilihan yang dimiliki khalayak dalam segi isi informasi dan waktu yang bias digunakan untuk mengaksesnya.
2. Dimensi besaran usaha yang harus dikeluarkan oleh khalayak untuk dapat menerima pesan dari media yang bersangkutan. Dengan kata lain, bagaimana perbandingan aktivitas yang dilakukan khalayak dengan aktivitas yang dibuat media.
3. Dimensi tingkat respon media terhadap khalayaknya. Maksudnya adalah seberapa aktif sebuah media dapat merespon umpan balik yang diberikan khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi menanggapi umpan balik yang diberikan oleh khalayaknya dengan cepat. Dalam kondisi tertentu, media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat melakukan interaksi dengan khalayaknya seakan-akan melakukan percakapan langsung.
4. Dimensi kemampuan untuk mengawasi pengguna informasi oleh khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat memantau perilaku khalayak dalam menerima pesannya, kemudian

menyesuaikan sistemnya berdasarkan umpan balik yang dihasilkan dari analisis perilaku tersebut.

5. Dimensi kemudahan dalam menambah informasi baru. Maksudnya adalah seberapa mudah khalayak dapat turut menyediakan dan menyebarkan pesan kepada khalayak lain. Berdasarkan kriteria ini, siaran televisi memiliki interaktivitas rendah, sedangkan media *online* memiliki tingkat interaktivitas yang sangat tinggi.
6. Dimensi kemampuan memfasilitasi komunikasi internet. Maksudnya adalah seberapa mudah interaksi terjadi antar khalayak dapat terjadi (Heeter, 1988:25).

Jelas *new media* (media baru/media *online*) memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru dan ter-update informasinya. Kelemahannya pada jaringan koneksi internet saja jika jaringan internet lancar dan cepat maka informasi yang disampaikan kepada pembacanya dengan cepat serta harus ada juga koneksi internet dimana pun berada bersama media baru (*new media*/media *online*). Media *online*/media baru (*new media*) masuk ke dalam kategori komunikasi massa, karena pesan yang disampaikan kepada khalayak luas lewat media *online*/media baru (*new media*).

Internet merupakan salah satu teknologi komunikasi baru juga memiliki kemampuan untuk membantu kita memilih dan mengatur

informasi yang kita inginkan atau perlukan dengan lebih efisien. Secara garis besar, internet jauh lebih luwes dalam menjembatani waktu dan jarak dibandingkan media-media yang sudah ada terlebih dahulu.

Sebagai media komunikasi, internet mempunyai peranan penting sebagai alat (*channel*) untuk menyampaikan pesan (*message*) dari komunikator/penyalur pesan (*source*) kepada komunikan/penerima pesan (*receiver*). Sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah transaksional, dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif (terus-menerus) dan ada umpan balik (*feedback*) dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antar individu dengan mempertimbangkan untung/rugi dalam setiap interaksi.

Internet juga dianggap memiliki kapasitas besar sebagai media baru. Tidak hanya memperkecil jarak dalam mengkomunikasikan pesan, teknologi komputer dan internet juga telah berkembang dan mengeliminasi penggunaan koneksi kabel, namun tetap bias memfasilitasi taransmisi informasi yang snagat cepat ke seluruh dunia (Bagdakian, 2004:114). Menurut Bagdakian, duplikasi dan penyebaran matri dari Internet ini bisa mencapai jangkauan yang sangat luas. Satu orang khalayak bisa mengunduh kemudian menyebarkannya pada orang-orang dalam jaringan pertemanan atau jaringan kerjanya. Kemudian pihak yang mendapatkan sebaran itu bisa menyebarkannya lagi pada orang-orang dalam jaringannya, dan seterusnya.

Definisi mengenai *online* diberikan oleh John M. Echols dan Hasan Shadily (1993). *On* berarti sedang berlangsung, dan *line* berarti garis, barisan, jarak dan tema Singkatnya, *online* berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet. Menurut Harris Poll (1969), lebih dari 137 juta orang Amerika melaksanakan seluruh kegiatan mereka melalui dunia internet. Pada tahun 1995, hanya 9% orang yang belum memanfaatkan internet. Saat ini diperkirakan pengguna internet lebih dari tiga jam perharinya.

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media *online* sebagai berikut : Media *online* (*online media*) adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs *web* (*website*) internet. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media *online* adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) radio, televisi, dan film/video. Media *online* merupakan produk jurnalistik *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai "pelaporan fakta ataupun peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet". Secara teknis atau "fisik", media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).

Pengertian media *online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa

dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka *email*, *mailing list* (milis), *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media *online*.

Pengertian media *online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media *online* secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara *online*. Jurnalistik *online* – disebut juga *cyber journalisme* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan di distribusikan melalui internet”.

Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* atau situs *web*, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan email. Media *online* berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu:

- a). Situs Berita Berupa "Edisi *Online*" dari Media Cetak Surat Kabar atau Majalah.

Suatu situs pemberitaan yang diambil dari sebuah surat kabar atau majalah dalam pembublikasian disuatu situs portal pemberitaan jadi disini berita tidak hanya tersedia di media cetak akan tetapi media

juga tersedia di media situs *online* seperti halnya: republika *online*, kompas cybermedia, media-indonesia.com, dan lainnya.

b). Situs Berita Berupa "Edisi *Online*" Media Penyiaran Radio.

Situs berita ini berasal dari suatu saluran radio, akan tetapi sekarang sudah bisa dinikmati melalui media *online*. Karena untuk mempermudah pengguna atau pendengar menikmati siarannya radio maka juga disediakan versi *onlinenya* seperti serua streamingnya. Contohnya : RRIpro4.com, suarasurabaya.net.

c). Situs atau Portal Berita *Online* Murni Yang Tidak Terkait Dengan Media Cetak Atau Elektronik.

Situs berita ini tidak terkait dengan media cetak maupun media televisi ataupun radio. Situs berita *online* ini murni produk pemberitaan sendiri sehingga menjadikan media *online* sebagai produk utama dalam media keredaksian sehingga pemberitaan selalu diperbarui setiap perjam karena salah satu karakter dari pemberitaan *online* adalah selalu cepat diperbarui. Contohnya: antaranews.com, detik.com dan viva.co.id

d). Situs "Indeks Berita" Yang Hanya Memuat Link-Link Berita Dari Situs Berita Lain.

Situs berita ini tidak memiliki tim keredaksian dalam pembuatan berita jadi situs berita ini hanya mengambil atau mengelink dari

situs berita milik media *online* lainnya. Seperti media *online* milik dari: *yahoo! news*, *google news*, *cealsea news* dan *news now*.

Pengaruh teknologi telah berdampak besar dalam kehidupan manusia. Saat ini, teknologi ada dimana-mana dan hampir dalam semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh teknologi. Terkadang, teknologi yang dihasilkan manusia membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu teknologi tersebut menjadikan hidup manusia menjadi susah. Teknologi membentuk dan mengubah budaya serta lingkungan manusia. Pengalaman manusia tanpa teknologi sangatlah sedikit dan justru menjadi aneh ketika manusia tanpa menggunakan teknologi (Lim, Francis, 2008: 1).

Teknologi mengalami berbagai macam inovasi dari yang sebelumnya sederhana (mekanik) menjadi lebih canggih (*microelektrik*). Teknologi canggih yang digunakan manusia saat ini adalah teknologi yang dikendalikan oleh komponen *microchip*. Komponen tersebut telah diprogram oleh manusia sesuai kebutuhan melalui baris logika yang tersistematis dalam struktur algoritma.

Dengan adanya komponen microchip, perangkat elektronika dapat dibentuk secara portable dan mobile. Perangkat yang mengintegrasikan microchip di dalamnya seperti komputer, *handphone*, *smartphone*, tablet PC, laptop dan berbagai perangkat penghitung dan perangkat komunikasi.

Komponen microchip tersebut yang berfungsi untuk mengolah dan memproses sinyal-sinyal digital. Digital merupakan kombinasi urutan bilangan-bilangan biner 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal disebut sebuah “bit” teknologi digital yang memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog (Jack, 2002:142):

- a. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi (*instant*).
- b. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.
- c. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk.
- d. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.

Perkembangan teknologi membawa babak baru bagi peradaban manusia. Dalam hal ini teknologi digital seperti komputer dan telepon seluler memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar perangkat berteknologi tinggi seperti komputer hadir dalam keseharian masyarakat. Melalui layanan internet masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dan berkomunikasi.

Lembaga publik atau organisasi sebaiknya lebih peka dalam mengikuti perkembangan teknologi. Melalui teknologi berbasis digital, hambatan jarak, ukuran dan ruang dapat diatasi, sehingga memungkinkan peristiwa yang terjadi di berbagai bagian dunia dapat dilihat secara live atau real-time di seluruh dunia secara praktis. Saat ini lingkungan telah dikuasai oleh berbagai macam *interface*, yaitu relasi yang diperantai oleh mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia dengan mesin. *Interface* di dalam lingkungan, dengan aneka peralatan dan *gadget* yang mendukungnya, mengakibatkan terbentuknya gaya hidup digital di dalam masyarakat mutakhir (Yasraf, 2010:240).

Wujud demokrasi tentang keterbukaan informasi di era digital informasi ini juga tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial yang diharapkan salah satu unsurnya adalah keadilan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa. Humas pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Era sekarang ini disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi publik kemudian dikelola oleh pejabat yang ditunjuk untuk menangani informasi publik. Pejabat tersebut dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tanggung jawab untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang disampaikan ke publik berisikan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan anggaran belanja daerah maupun anggaran belanja Negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program yang dihasilkan oleh pemerintah dengan bantuan pengawasan oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengembangan program suatu instansi, dapat mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan dan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Good Governance*.

Good Governance merupakan sebuah konsep pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan objektif dan adil (Srijanti, 2007). Umumnya sama dengan prinsip transparansi dalam setiap aktivitas pemerintahan. Prinsip transparansi ini diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam interaksi yang dilakukan antara pemerintahan dan masyarakat. Piotrowsy dan Van Rinzin (Dalam Dwiyanto, 2011) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui website secara aktif, perlindungan terhadap whistle blowers dan bahkan melalui pembocoran informasi secara ilegal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lewat media *online* di era digital informasi sangatlah bermanfaat dalam menginformasikan seluruh kegiatan pemerintahan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan konsep pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan objektif dan adil.

B. Kajian Teori

1. *Boundary Spanning*

Definisi kaitan Public Relations atau Humas sebagai *boundary spanning* atau yang sering disebut juga dengan *boundary manager* menurut Grunig dan Hunt dalam Soemirat (2011:87) bahwa seorang praktisi Humas dapat bertindak sebagai penjabat penghubung atau penyedia informasi yang diformalisasikan melalui saluran teknologi informasi (IT) canggih dengan model sistem informasi manajemen yang dikelola secara cepat, akurat, dan informatif. Selanjutnya Humas berfungsi sebagai *boundary spanner* melalui pengelolaan informasi mengenai permasalahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi dengan cara menghimpun, menyalurkan, dan hingga menyeleksi arus informasi terkini. Analisis secara tepat guna ke jajaran pemimpin puncak organisasi sebagai decision maker untuk menjadi dasar proses pembuatan suatu keputusan strategis demi kepentingan organisasi atau publiknya secara efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.

Humas memiliki fungsi sebagai penghubung antara organisasi dan lingkungannya. Fungsi ini disebut juga dengan *boundary spanning*. Melalui fungsi ini Humas berhubungan dengan lingkungan organisasi untuk monitoring, seleksi dan menghimpun informasi. Kriyantono (2014:87) dalam bukunya menjabarkan tentang aktivitas melaksanakan fungsi *boundary spanning* :

a. Informasi Publik

Fungsi Informasi Publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan informasi tentang organisasi kepada publiknya atau lingkungannya. Menginterpretasikan filosofi, kebijakan, program, dan apa yang dipikirkan manajemen dengan lebih mudah dimengerti oleh publiknya.

b. Monitoring Lingkungan

Memonitor lingkungan untuk mengetahui apa yang terjadi dan menginterpretasi isu-isu yang potensial memengaruhi aktivitas organisasi serta membantu manajemen merespons isu-isu tersebut melalui isu manajemen.

c. Komunikasi Antara Publik dan Organisasi

Membangun sistem komunikasi dua arah dengan publiknya agar organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan peran public relations yang merupakan fasilitator komunikasi.

Tujuan dari *boundary spanning* adalah menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*) antara organisasi dengan publik terkait, baik internal maupun eksternal. Saling pengertian ini yang nantinya akan menimbulkan pendapat dan anggapan masyarakat tentang sebuah institusi.

Proses public relations dalam pendekatan boundary spanner terdiri dari beberapa langkah menurut Cutlip dan Center dalam Ruslan (2010:90), yaitu “*fact finding, planning, commications, dan evaluation.*”

1. *Fact finding* adalah mencari dan mengumpulkan fakta atau data sebelum melakukan tindakan. Misalnya public relations sebelum melakukan suatu kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui, misalnya : apa yang diperlukan publik, siapa saja yang termasuk publik, bagaimana keadaan publik dipandang dari beberapa faktor.
2. *Planning* adalah berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai macam masalah itu.
3. *Communicating* adalah rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan fakta atau data sebelumnya, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasional.
4. *Evaluation* adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Evaluasi itu dapat dilakukan secara kontinyu. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kegiatan public relations berikutnya.

Teori ini penulis anggap cocok dengan penelitian ini karena Humas dalam hal ini menjadi jembatan informasi dua arah antara pihak organisasi/lembaga dengan publiknya baik itu internal maupun eksternal dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, Humas tidak hanya harus mampu

menyampaikan itikad dari organisasi kepada publik tapi juga kemauan publik yang harus disampaikan juga kepada organisasi tersebut.

2. *Cyber Public Relations*

Dalam membangun citra positif yang dilakukan oleh praktisi Humas, *Cyber PR* adalah salah satu inisiatif PR atau Public Relations yang menggunakan internet sebagai sarana publisitasnya. Pemanfaatan media website untuk kepentingan PR merupakan penghematan besar atas biaya kertas, cetak dan pengirimannya (Onggo, 2014:6).

Penggunaan *website* sudah menjadi suatu perhatian oleh banyak kalangan, mulai dari pengusaha, akademisi, pemasaran, praktisi media massa, perusahaan, hingga instansi pemerintahan. Dari *website* ini banyak kalangan menggunakannya sebagai media promosi, alat penjualan, hingga memberikan materi informasi yang berkaitan gambaran detail suatu instansi atau lembaga. Kini semakin maraknya penggunaan *website* oleh berbagai orang dan juga kalangan, maka membuat perusahaan maupun instansi pemerintahan menggunakan *website* perusahaan. *Website* perusahaan merupakan sarana komunikasi yang pertama kali dan paling populer dilihat oleh organisasi. Oleh karena itu, pada abad ini setiap perusahaan mesti melengkapi sarana komunikasinya dengan membuat *website* (Kriyantono, 2014:260).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak lepas dari penggunaan teknologi, informasi dan

komunikasi oleh Humas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Richardus E. Indrajit, pada intinya *e-Government* adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Istilah *Cyber PR* atau *Electronic PR* (E-PR) digunakan untuk kegiatan Public Relations (PR) yang menggunakan media internet sebagai media publikasinya. Kegiatan *Cyber Public Relations* dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai 3R bagi perusahaan (Julius Onggo, 2014:6), yaitu:

1. *Relations*, mampu berinteraksi dengan berbagai target audiens untuk membangun hubungan dan citra lembaga/instansi.
2. Reputasi, Aset yang paling penting dalam suatu bisnis. *Cyber Public Relations* merupakan suatu senin dalam membangun reputasi *online* secara berkesinambungan
3. Relevansi, artinya adalah mengupayakan agar kegiatan insiatif Public Relations secara *online* relevan dengan target publik korporat.

Saat ini keberadaan media *online* tidak dapat dihindarkan lagi, karena media *online* internet dan komunikasi teknologi merupakan media yang membuat seluruh dunia tersambung, sehingga dapat mendatangkan dampak sekaligus manfaat yang tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan keberadaan

internet sebagai penyebaran informasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi publik dan menghasilkan citra positif pada perusahaan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan yang saya gunakan untuk memberikan pengayaan terhadap penelitian saya sekaligus menjadi contoh dalam melakukan riset dan penulisan. Dari beberapa jurnal yang saya temui saya belum menemui judul yang persis sama dengan tema penelitian penulis namun penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan terkait teori maupun metodologi yang akan penulis gunakan.

1. Syaiful Azhary, Rachmat Kriyantono. *Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018: 213-220, Universitas Brawijaya, Kota Malang. ISSN: 0000-0000*

Penelitian ini dilakukan oleh Syaiful Azhary, Rachmat Kriyantono. *Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online*. Dalam penulisan yang dilakukan penulis kali ini, penulis mengambil objek yang sama, namun yang membedakan penelitian ini menggunakan metode mixed methods dimana bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman Humas pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi dalam menerapkan Humas *online*. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada para pengelola website badan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Humas *online* masih belum memenuhi karakteristik Humas *online* yang ideal dalam hal operasionalisasi fitur-fitur transparency, interactivity, usability, dan website maturity. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa operasionalisasi interactivity menjadi unsur dominan dalam aktivitas di platform media sosial resmi badan publik di Indonesia. Mereka lebih memanfaatkan media sosial daripada website resmi, sehingga peneliti berargumentasi bahwa pemahaman humas terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi masih kurang.

2. Raesa Nadya, Dr. Mahyuzar. *Peran Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh Dalam Mempublikasikan Kegiatan Pimpinan Di Media Online*. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP Volume 3, Nomor 4, November 2018. Universitas Syiah Kuala, Aceh. ISSN: 0000-0000

Penelitian ini dilakukan oleh Raesa Nadya, Dr. Mahyuzar di Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai peran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media *online*. Dalam jurnal ini penulis mengambil objek yang sama yakni Humas namun yang membedakan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokusnya. Penulis mengambil fokus pengelolaan media online, sedangkan penelitian terdahulu meneliti peran Humas. Penelitian terdahulu ini juga menggunakan 4 kategori peran Humas menurut Dozier & Broom yang dijadikan acuan oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian karena dapat menggambarkan bagaimana peran yang telah dijalankan dengan baik oleh Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam

mempublikasikan kegiatan pimpinan di media *online*, sedangkan Penulis menggunakan teori Boundary Spanning dan Cyber PR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan ialah teknik *Purposive Sampling* dengan 5 informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menjalankan peran dengan baik dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan secara rutin di media *online* dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan pimpinan kepada publik lalu mempublikasikan informasi tersebut melalui media *online*.

3. Centurion Chandratama Priyatna, F.X Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, Anwar Sani. *Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik*. <http://jurnal.unpad.ac.id/> Volume 8, No. 1, Juni 2020, hlm. 114-127. Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. ISSN:0000-0000

Penelitian ini dilakukan oleh Centurion Chandratama Priyatna, F.X Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, Anwar Sani. *Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi sesuai dengan standar yang tertulis pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dalam penulisan yang dilakukan penulis kali ini, penulis mengambil tema yang hampir sama

menganai pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penulis bahwa penelitian ini menggunakan mix method dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian Penulis hanya menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas responden yang terdiri dari tenaga humas Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi telah melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam bentuk penyebaran narasi tunggal dan program prioritas pemerintah melalui media *online* dan media sosial serta melakukan media monitoring dan audit komunikasi sebagai bentuk controlling dan evaluasi.

4. Juariyah. *Peran Humas Pemerintah (Government Public Relations) Menghadapi Era Web 2.0. Proceeding International Seminar Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Relations, Jember 30 Maret 2016. Universitas Jember, Jember. ISBN: 968-602-6988-16-4.*

Penelitian ini dilakukan oleh Juariyah untuk melihat peran Humas pemerintah (*Government Public Relations*) dalam menghadapi era Web 2.0. Dalam penulisan yang dilakukan penulis kali ini, penulis mengambil subjek yang sama yakni Humas pemerintah, namun yang membedakan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yakni menganalisis Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola publikasi berita melalui media *online* serta menganalisis penyebab Humas tidak memanfaatkan media online pada Sekretariat DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan. Dampak munculnya internet dalam kehidupan manusia dirasakan istimewa dan dapat dikatakan sebagai zaman keemasan komunikasi yaitu periode perubahan besar. Perubahan-perubahan radikal yang telah terjadi di web sekarang telah membawa petugas Hubungan Masyarakat untuk secara langsung kontak dengan masyarakat. Seorang Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) memiliki tugas menjelaskan dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap warganya termasuk kalau ada isu kontroversial.

Dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki peran ganda, yaitu saat berurusan dengan media maupun publik, mereka harus mendukung posisi pemerintah menjelaskan manfaat langkah-langkah yang diambil pemerintah, dan di sisi lain mereka harus mendukung media dan kepentingan publik, misalnya membicarakan topik yang belum siap untuk dibahas oleh para pejabat.

Fungsi Humas Pemerintah dalam era Web. Sosial (Era 2.0) sekarang ini haruslah menjadi bagian dari user generated content, yaitu komunikasi yang menggunakan media sosial untuk memuat berbagai masalah dengan cara yang efektif. Pekerjaan seorang Humas pemerintah tidak ubahnya seperti seorang wartawan, yang dalam pekerjaannya selalu dekat dengan Public Relations digital dan mampu melakukan pekerjaannya hanya dibelakang meja. Mereka selalu mengoptimalkan mesin pencari seperti *Google*, *Microsoft Search* dan *Yahoo!*. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkolaborasi dan berimprovisasi secara

efektif, selalu berorientasi pada perubahan, dan memiliki keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan.

5. Okafor Godson Okwuchukwu (Ph.D), Malizu Chinonye Faith. *Research Article Effective public relations and organizational management: The Bond. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research* 2(1): (2015): 24–30, Department of Mass Communication, Nnamdi Azikiwe University Awka, Nigeria. ISSN: 2393-8870

This research article was written by Okafor Godson Okwuchukwu (Ph.D) and Malizu Chinonye Faith .In recent years, the argument concerning the effects of public relations in organization management has attracted the concern of various scholars. Consequently, professionals and scholars alike have looked for the key concepts to establish the value of public relations. However, the terms “relationships” and “reputation” have emerged as the focal concepts in explaining the purpose and value of public relations. The concepts of organization-public relationships and organizational reputation can be integrated within a theoretical framework of public relations effectiveness. When those concepts are integrated in a model, the role of public relations can be captured more clearly than when there is a separate focus on each of the concepts. Therefore, this study sort to examine the effects of public relations in achieving effective organizational management.

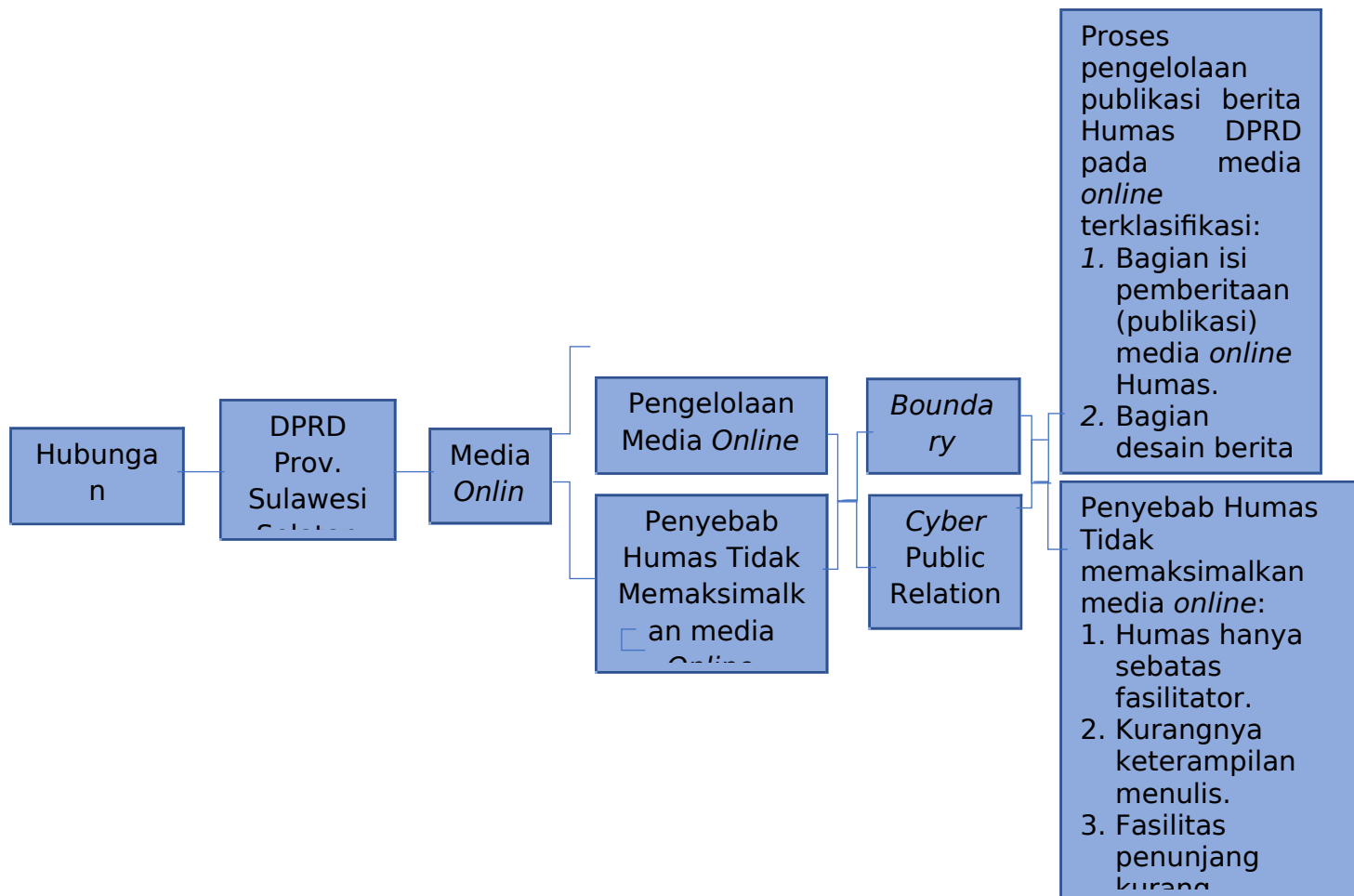
D. Kerangka Pikir

Umumnya Humas digunakan sebagai komunikator penyebarluasan informasi mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi/lembaga kepada masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat membangun citra positif instansi terkait serta dapat membentuk opini positif publik terhadap kinerja pemerintah. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak lepas dari penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang diyakini paling efektif di Era Digital Informasi seperti saat ini yakni dengan memanfaatkan media *online*. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menggunakan media *online* sebagai sarana informasi dan publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Humas menjadi jembatan informasi dua arah (*Boundary Spanning*) antara instansi/lembaga dengan publiknya baik itu internal maupun eksternal dan juga sebaliknya. Penerapan *Cyber Public Relation* meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Melalui pendekatan teori *Boundary Spanning* dan *Cyber Public Relation* ini kemudian dapat memberikan gambaran mengenai proses pengelolaan publikasi berita melalui media online pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kendala Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak

memaksimalkan publikasi pada media online di Era Digital Informasi seperti saat ini.

Penggunaan media online dalam instansi/lembaga pemerintahan tentu menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam ranah Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana kita ketahui bahwa media online memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan keakuratan dalam penyebarluasan publikasi berita yakni *realtime* dan juga *up to date*. Dari ciri khas media online tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan media-media lain yang kemudian dimanfaatkan dan diterapkan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyebarkan informasi dan publikasi seputar DPRD Sulawesi Selatan, dengan harapan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi tersebut. Dari apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, kemudian digunakan teori *Boundary Spanning* dan *Cyber Public Relation* maka menghasilkan penelitian bahwa proses pengelolaan publikasi berita Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada media *online* terklasifikasi menjadi dua bagian yakni bagian isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas dan bagian desain berita publikasi *online* Humas. Selain proses pengelolaan publikasi berita Humas DPRD pada media *online*, penelitian ini juga turut menganalisis penyebab Humas tidak memaksimalkan media *online* atas beberapa penyebab antara lain Humas hanya sebatas fasilitator, kurangnya keterampilan menulis, fasilitas penunjang kurang memadai, dan minimnya anggaran.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan bagian dari kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus kurangnya publikasi di media *online* pada Humas DPRD Prov. Sulawesi Selatan tersebut.

Untuk meringkas dan menarik realitas-realitas yang ada, peneliti akan mewawancarai para informan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dirancang sesuai dengan maksud penelitian. Setelah informasi berupa pertanyaan dari informan terkumpul, informasi tersebut kemudian di sederhanakan menjadi sebuah teks yang kemudian akan diolah dan kemudian di analisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa deskripsi yang kemudian dapat diinterpretasikan dengan suatu makna tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat pada Jl. Urip Sumohardjo No. 59 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, berdasarkan observasi awal peneliti melihat kurangnya informasi dan publikasi pemberitaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media *online*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian (Daymon, Holloway, 2002). Data primer diperoleh secara langsung yaitu melalui proses wawancara langsung dengan narasumber yaitu pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi sebagai pelaksana teknis kehumasan, Anggota DPRD, dan Publik Humas yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara dan observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2011:137)). Data sekunder dapat diperoleh melalui studi literatur, jurnal-jurnal, buku teks, media *online* serta dari kantor maupun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengambilan Data dan Jumlah Informan

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti (Slamet 2011). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pemahaman para objek penelitian mengenai penggunaan media *online* di era digital informasi.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan Peneliti secara mendalam dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data

lengkap yang dianggap memiliki informasi kunci mengenai Analisis Penggunaan Media *Online* oleh Sub Bagian Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti melakukan wawancara mendalam yakni kepada Sekretaris DPRD yang membawahi langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Kepala Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi, empat orang Staf Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi, dua orang anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan serta enam orang publik DPRD Sulawesi Selatan. Informan tersebut memiliki peran penting terhadap kehumasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dianggap representatif untuk menjawab pertanyaan Peneliti.

Peneliti memilih lima belas naarasumber tersebut karena sebagian memiliki peran utama dalam pelaksanaan aktifitas di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Wawancara Semistruktur

Wawancara ini peneliti dapat memiliki panduan wawancara tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas.

Guna mengarahkan penulis dalam pengumpulan data, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah panduan wawancara. Guna memahami lebih dalam tentang peran dan fungsi Humas maka penulis merasa perlu memberikan ruang agar penulis dapat memberikan

pertanyaan lanjutan jika dibutuhkan. Sehingga penulis dapat memahami dengan baik pemanfaatan media *online*, implementasi serta tantangan yang dihadapi oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di era digital informasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan objek-objek melalui penggunaan panca indra. Penulis mengambil dua instrumen observasi yaitu Analisi Dokumen dan *Diary Keeping*. Dokumen yang dianalisa dapat berupa dokumen publik maupun privat sedangkan *Diary Keeping* artinya peneliti menyimpan catatan harian yang berisi perasaan, sentimen, pemikiran berkala dan pikiran lainnya mengenai proses riset itu sendiri. Peneliti harus memahami setting atau situasi tempat observasi, subjek atau siapa yang di observasi, perilaku subjek observasi, frekuensi observasi serta dokumentasi observasi (Kriyantono, 2014). Guna memahami lebih dalam tentang penggunaan media *online* pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, penulis merasa perlu terjun langsung dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan selama masa penelitian.

Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Jogiyanto (2007:79) menyatakan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) tertentu atau jatah (*quota*)

tertentu. *Judgement sampling* adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Sedangkan *quota sampling* berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya.

Informan dalam penelitian adalah pihak yang representatif dalam memberikan informasi terkait penelitian penulis. Penulis melihat ada beberapa orang yang dapat dianggap representatif dalam penelitian ini yaitu Sekretaris DPRD yang membawahi langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, informan kedua adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, ketiga yakni Kepala Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi, keempat adalah Staf Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi sebagai Pelaksana teknis kehumasan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 14 (Empat Belas) orang akan dipilih menjadi 2 Orang wanita dan 5 Pria. Mereka merupakan pelaksana yang menjalankan tupoksi Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis juga mengambil sampel 2 orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 6 orang publik Humas atau masyarakat yang penulis anggap informan tersebut representatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Tabel Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/ Jabatan
-----	---------------	---------------------	--------------------

1.	M. Jabir	Strata 2	Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Syamsiah	Strata 2	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Mahyuddin	Strata 2	Kepala Sub. Bagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi
4.	Asrul Nurdin	Strata 1	Staf Humas
5.	Asmira AM	Strata 1	Staf Humas
6.	Achmad Adam Abdullah	Strata 1	Staf Humas
7.	Muh. Imran Saputra	Strata 1	Staf Humas
8.	Andi Ina Kartika Sari	Strata 2	Ketua DPRD Prov. Sulsel
9.	Muzayyin Arif	Strata 2	Wakil Ketua DPRD Prov. Sulsel
8.	Qudratullah	Strata 2	Dosen
9.	Reni Juliani	Strata 1	Ibu Rumah Tangga
10.	Nur Marwah	Strata 1	Mahasiswi
11.	Muchtar Lutfi	Strata 1	Pegawai Bawaslu Prov. Sulsel
12.	Isnaniah Nurdin	Strata 2	Humas Pemkot. Makassar
13.	Syarifah Kinanggi	Strata 1	Humas Pemkab. Bulukumba

Sumber: Olah data oleh Penulis, 2020

Proses pemilihan informan dimulai ketika penulis melakukan kunjungan awal ke lokasi penelitian dan melakukan observasi awal tentang penggunaan media *online* oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

F. Teknik Analisis Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data hasil penelitian, maka akan dilakukan

analisis data hasil penelitian. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menghimpun keseluruhan data hasil wawancara dengan informan serta observasi langsung di lokasi penelitian.

Analisis kualitatif tidak ada cara yang baku dalam dalam pengaturannya, sehingga untuk setiap peneliti dapat melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, namun pada dasarnya analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori tertentu dengan baik dan selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Menurutnya terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif:

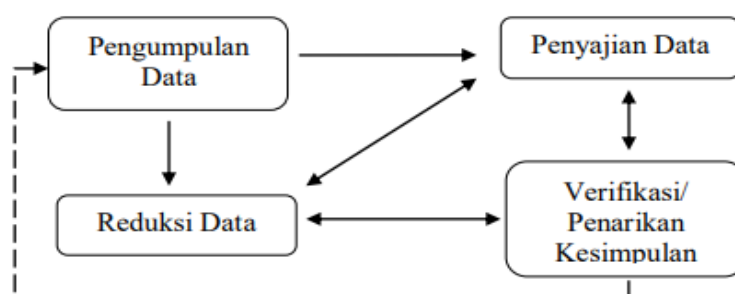
1. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber melalui observasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi dan sebagainya.

Reduksi data, pada lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam penjelasan laporan yang lengkap dan juga terperinci. Data dan laporan penelitian kemudian direduksi, dirangkum, dan pilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk memilih sesuatu yang paling penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan) reduksi data dilakukan terus menerus selama proses selama penelitian

berlangsung. Langkah selanjutnya setelah pemilihan data dilakukan yaitu melakukan penyederhanaan, data yang tidak diperlukan dapat disortir agar memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian dan penarikan kesimpulan sementara.

2. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam proses penarikan kesimpulan pada awal belum memperhatikan hasil yang kuat, terbuka dan skeptic, pada kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Dari awal melakukan proses pengamatan di lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan juga mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu untuk mencari pola tema utama, hubungan, persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative. Proses analisis data dapat dilihat dalam skema berikut ini :



Sumber : Miles dan Huberman (2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebagai unsur Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Kedudukan ini menyebabkan DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga untuk menyukseskan pelaksanaan tugasnya, jelas membutuhkan adanya unit kerja pembantu kesiapan dan kelancaran kegiatan administrasi.

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan tugasnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perangkat pendukung yang disebut Sekretariat. Sekretariat ini merupakan unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pada dasarnya sejarah keberadaan sekretariat tidak dapat dipisahkan dengan sejarah keberadaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada awal lahirnya DPRD yang diberi nama DPRD-GR pada tahun 1962, Sekretariat bernama Biro Urusan Dewan berlokasi di jalan Riburane Ujung Padang (Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I/DKM sekarang). Biro Urusan Dewan selanjutnya berubah menjadi Sekretariat

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada saat terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Perda tersebut, Sekretariat DPRD terbagi atas bagian yaitu Umum, Persidangan dan Risalah, Keuangan dan Humas Protokol.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda dengan SKPD lainnya karena selain mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya yang secara struktural kelembagaan ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah elainkan juga bertanggungjawab kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan secara teknis operasional.

Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan, perlu diatur tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

a. Kedudukan

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Umum, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;

b. Subbagian Rumah Tangga; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

3. Bagian Program Dan Keuangan, meliputi:

- a. Subbagian Perencanaan Dan Penganggaran;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi Dan Pelaporan.

4. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan, meliputi:

- a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Persidangan Dan Risalah; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol Dan Publikasi.

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan, meliputi:

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Subbagian Kerjasama Dan Aspirasi.

c. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

1. Tugas Pokok

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga

ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. Tata Kerja

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Medistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Menghadiri rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja DPRD;
- g. Mengoordinasikan dan merencanakan kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan;
- h. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan terhadap anggota DPRD;
- i. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan terhadap anggota DPRD;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- k. Menyelenggarakan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
- l. Mengomunikasikan dan mengharmonisasi tugas dan fungsi antar bagian;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD;

- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsialat kelengkapan dewan;
- o. Mengoordinasikan dan memfasilitasi sarana dan prasaran kerja fraksi-fraksi DPRD;
- p. Memfasilitasi ketersediaan sarana kebutuhan kerja tenaga ahli DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/instansi terkait;
- s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan melaporkan tugas operasional kepada Pimpinan DPRD.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

membawahi langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, informan kedua adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, ketiga yakni Kepala Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi, kriteria keempat adalah Staf Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi sebagai pelaksana teknis kehumasan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan serta informan selanjutnya adalah publik atau masyarakat.

Informan tersebut diambil dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat umum, berikut uraiannya:

1. M. Jabir, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, beliau merupakan pemegang keputusan tertinggi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Syamsiah, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, beliau dipilih sebagai informan kedua karena dalam aktifitas kehumasan merupakan bagian dari bagian persidangan dan perundang-undangan dalam melakukan koordinasi serta melaksanakan dukungan penyelenggaraan dan fungsi DPRD di bidang legislasi.
3. Mahyuddin, Kepala Sub. Bagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi, beliau dipilih sebagai informan ketiga karena merupakan kepala sub.

bagian yang khusus mengurus kegiatan atau hal yang berkaitan dengan aktifitas Humas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan operasional.

4. Asrul Nurdin, Asmira AM, Achmad Adam Abdullah, dan Muh. Imran Saputra. Mereka merupakan tenaga teknis yang bertugas langsung baik di kantor maupun dilapangan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penyebaran informasi dan publikasi Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sementara aktif menjabat. Pemilihan informan ini karena informan sudah relatif lama duduk sebagai anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan dan sudah mengetahui secara detail proses dan hasil kerja Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Selatan.
6. Qudratullah, Reni juliani, Nur Marwah, Muchtar Lutfi, Isnaniah Nurdin, dan Syarifah Kinanggi. Mereka merupakan masyarakat umum yang menjadi “publik” dari Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Informan tersebut dipilih karena penulis menganggap orang tersebut “melek” terhadap perkembangan informasi dan komunikasi.

1.1. Humas dalam mengelola publikasi berita melalui media *online*

pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Wawancara pertama Penulis lakukan dengan informan inti penulis yaitu Kepala Subbagian Humas Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan, Mahyuddin. Wawancara ini Penulis lakukan pada bulan Februari 2021 di ruangan kerja beliau yang terletak terpisah dari ruangan staf dan ruangan server. Beliau menyambut Penulis dengan cukup hangat. Dalam wawancara tersebut, Pak Mahyuddin mengatakan bahwa Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga membutuhkan media penyampaian informasi kepada publik guna menyampaikan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saluran yang paling efektif yang digunakan Humas di era digital informasi seperti saat ini adalah dengan memanfaatkan media *online*. Dalam hal ini media *online* juga memberikan ruang yang lebih untuk terjadinya interaksi yang melibatkan adanya umpan balik. Keberadaan media online atau media massa berbasis online memungkinkan kita untuk menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam mendapatkan informasi:

“Saya kira media yang paling melekat di masyarakat saat ini yakni media *online*. Makanya kita memanfaatkan juga sebagai saluran publikasi Humas DPRD, karena selain memudahkan khalayak untuk mengakses informasi apapun itu, baik peristiwa yang terjadi disekitarnya maupun yang jauh diluar sana. Yang paling penting itu bisa meraup pembaca terbanyak dibanding media-media lain.”(Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Hal senada juga dikatakan M. Jabir, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Bagi masyarakat umum, mengakses media *online* sangat mudah jika dibandingkan dengan media lainnya, kalau kita publikasinya melalui media cetak mungkin beberapa orang saja yang baca karena mesti beli korannya dulu kan. Media *online* juga sangat fleksibel karena bisa diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi lebih banyak yang baca. Humas DPRD sudah lama kelola ini (media *online*) sebagai salah satu saluran publikasi andalannya kita.”(Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan media online sebagai sarana publikasi sejak tahun 2016. Penulis juga menemukan bahwa pengelolaan media *online* pada Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan diklasifikasi menjadi dua bagian yakni pada bagian isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas dan bagian isi berita publikasi *online* Humas.

1.1.1. Bagian isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas

Pengelolaan isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini merujuk pada konten-konten berita di media online dan situs website DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Isi pemberitaan di media *online* yang paling mendasar dipublikasikan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yakni mempromosikan program kerja dan hasil rapat kedewanan. Hal tersebut dikatakan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Semua kegiatan dewan kalau bisa kita jadikan konten, kita publish semua, semakin banyak berita positifnya lebih bagus kan. Tapi yang terpenting itu kita posting soal program kerja dewan, mulai dari merancang hingga pengesahan hasil rapat dan putusan dewan itu juga penting diketahui masyarakat, apalagi kalau ada prestasi lebih bagus lagi dijadikan isi pemberitaan atau konten istilah anak mudanya.” Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Pada proses pengambilan data isi dari pemberitaan-pemberitaan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh dua orang staf menurut Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Ada Achmad Adam Abdullah dan Muhammad Imran Saputra yang berperan penting pada proses pengambilan data-data publikasi berupa rilis berita sekaligus menjadi fotografer di setiap kegiatan kedewanan.” (Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Dua orang staf Humas tersebut dipilih dan dipercayakan oleh Kepala Subbagian Humas untuk mengelola isi pemberitaan (publikasi) di media-media. Achmad Adam Abdullah dan Muhammad Imran Saputra dipilih karena dianggap telah mahir membuat *press rilis* serta ahli dalam mengambil gambar dengan kamera (fotografi).

Dalam pengambilan data-data publikasi, Penulis kemudian menanyakan tentang kegiatan mereka sehari-hari dan bagaimana para staf berkonsultasi ke pimpinan mereka. Menurut penulis hubungan emosional antara staf dan pimpinan dalam hal ini Kasubag Humas terjalin sangat baik. Terbukti ketika penulis melakukan penelitian pada Subbagian Humas, penulis menilai Kasubag Humas mempunyai sikap ramah. Sikap ramah itu tidak hanya ditunjukkan terhadap bawahannya, tetapi juga semua orang yang ia temui. Sikap itu ditunjukkan dengan sapaan ringan yang ia

tujukan dan juga kerap kali mengajak bercanda dengan anggotanya ketika sedang menanyakan kerjaan yang sedang ia tugaskan.

Achmad Adam Saputra mengatakan koordinasi antar staf dan kasubag Humas terjalin setiap hari melalui koordinasi langsung dan tidak langsung melalui media sosial.

“Karena kita orang lapangan, untuk koordinasi sama pak kasubag dan teman-teman Humas yang lain mengenai agenda dan jadwal anggota dewan, kita banyakan melalui grup *whatsapp* sih.”(Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Muh. Imran Saputra, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menjelaskan alur konten beritaHumas:

“Setelah mendapat daftar agenda anggota dewan mingguan (biasanya minggu malam paling lambat kita dapat), selanjutnya kita rembukkan jadwal Staf Humas yang bertugas beserta dengan isi berita atau konten apa saja lagi *happening* yang harus dipublikasikan di media.”(Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Selain berperan penting dalam proses pengambilan data-data publikasi, Humas juga sekaligus menjadi “jembatan” antara DPRD Sulawesi Selatan dan media. Upaya yang paling penting untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis antara organisasi maupun publik terutama dengan media dalam mempublikasikan kegiatan DPRD. Salah satu contoh menurut Achmad Adam Abdullah:

“Contohnya ketika Anggota Dewan butuh konferensi pers atau ada kegiatan yang mau diliput, kita panggilkan mi teman-teman media.” (Hasil wawancara, 18 Februari 2021).

Oleh karena itu penulis bisa menarik kesimpulan bahwa sangat diperlukan kerja sama yang baik antar sesama para staf Humas Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan dengan anggota DPRD dan insan media dalam rangka mempublikasikan kegiatan DPRD kepada publik melalui media.

Berbicara mengenai Humas yang menjadi fasilitator antara DPRD dan media, penulis kemudian menanyakan tentang proses penyebarluasan berita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media. Muh. Imran Saputra, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjawab ada dua cara yakni:

“Proses penyebarluasan berita hampir sama sebenarnya dengan Humas pemerintahan yang lain. Yang pertama dengan mengundang langsung wartawan yang akan meliput. Kalau kita sudah undang wartawan biasanya kita follow up wartawan yang akan hadir.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Untuk menjaga hubungan yang baik dengan media, Humas harus selalu dapat menjaga kelancaran komunikasi terutama dalam menghubungi media, begitu juga dengan pihak media, wartawan juga membutuhkan media komunikasi agar bisa selalu terhubung dengan pihak Humas untuk mendapatkan informasi atau *press release*, terutama jika wartawan berhalangan hadir dalam peliputan karena suatu alasan, pelayanan dalam komunikasi seperti inilah yang juga harus diperhatikan oleh pihak Humas. Seperti pernyataan Achmad Adam Abdullah, staf Humas yang aktif dalam men-dokumentasikan setiap kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam wawancaranya mengatakan:

“Kami selalu berupaya dalam menjaga komunikasi dengan media, agar kami dapat selalu terhubung, ini juga bisa memudahkan pekerjaan wartawan terutama dalam mendapatkan informasi atau press release jika wartawan berhalangan untuk hadir dalam peliputan, maka dari itu kami membuat sebuah grup di *whatsapp* selain itu kami juga menjaga komunikasi dengan media seperti via telpon, *email*, surat, dan lainnya.”(Hasil wawancara, 18 Februari 2021).

Mencermati pernyataan tersebut, penulis menilai Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selalu berupaya dalam menjaga komunikasi dengan media agar dapat selalu terhubung kapanpun, pelayanan seperti ini sangat disenangi oleh wartawan terutama jika mereka berhalangan hadir dalam peliputan dan membutuhkan informasi.

Sebuah grup *whatsapp* dibuat oleh Humas dengan tujuan memungkinkan semua anggota grup untuk mendapatkan informasi secara bersamaan sekaligus juga memudahkan antara Humas dan wartawan dalam berdiskusi secara *online*. Grup *whatsapp* diberi nama “Gudang Berita DPRD Sulsel”.

Gambar 4.2

Grup Gabungan Humas DPRD Sulsel dan Wartawan



Selain grup *whatsApp*, cara lain yang juga biasa digunakan oleh Humas untuk terhubung dengan media adalah via telepon. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, biasanya menggunakan telepon untuk menghubungi media jika sifat pesannya itu singkat, seperti menginformasikan kepada media bahwa akan ada kegiatan yang hendak dilakukan. Hal ini memungkinkan wartawan atau medianya untuk mengatur jadwal peliputan. Telepon juga sangat membantu untuk membangun hubungan dengan media, karena sifatnya akan terasa lebih pribadi serta meminimalisir *miss* komunikasi. Terkadang pihak Humas menghubungi wartawan pada siang hari sebelum waktu dimana dijadwalkannya kegiatan, karena biasanya wartawan akan sibuk untuk urusan peliputan pada pagi hari.

Selain via telepon, Humas DPRD juga biasanya menggunakan surat untuk menghubungi media, hal ini biasa dilakukan ketika Humas ingin menginformasikan kepada media tentang kegiatan yang akan dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan memerlukan informasi yang lebih banyak mengenai kegiatan tersebut, setidaknya informasinya lebih panjang daripada lewat telepon atau jika kegiatan yang hendak dilakukan itu sifatnya lebih resmi.

Menjaga komunikasi dengan media melalui kontak pribadi dianggap cukup efisien dalam menjalin hubungan dengan media, hal ini cukup membantu wartawan dalam menjalankan pekerjaannya. Menghubungi wartawan dan memberikan informasi, memungkinkan wartawan untuk

mempunyai sedikit gambaran sebelum melakukan peliputan, jika media mempunyai informasi yang banyak sebelum melakukan peliputan hal ini akan berdampak positif pada publikasi yang nantinya akan dilakukan.

Proses penyebarluasan berita kedua adalah dengan cara mengirimkan bahan rilis ke awak media. Proses ini biasa disebut dengan *backup* rilis Humas menurut Syamsiah, Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan:

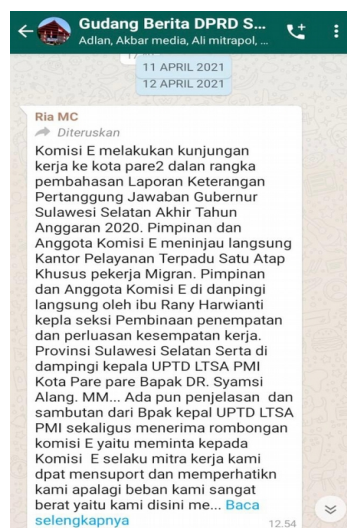
“Yang kedua mengirimkan bahan data-data publikasi pre-rilis beserta dengan gambar-gambar kegiatannya. Rilisnya kita kirim data-data yang penting saja biar wartawan bisa diolah kembali narasinya.”(Hasil wawancara 15 Februari 2021).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan komentar Asmira, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait alasan Humas hanya mengirimkan press rilis yang berisikan gambaran besar dari topik yang akan dipublikasikan:

“Supaya nanti publikasinya di media tidak ada yang sama kalimatnya, jadi dikirimnya cuma poin pentingnya saja. Begitu juga dengan fotonya, kita kirimkan minimal lima foto ke awak media biar mereka bisa memilih. Nah setelah itu bahan-bahan rilisnya kemudian di share melalui *Whatsapp* dan *Email* kepada para awak media yang berposko di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta ke Asrul Nurdin, untuk diposting beritanya di website DPRD Sulsel.” (Hasil wawancara, 18 Februari 2021).

Gambar 4.3

Poin-poin isi rilis yang dibuat dan dibagikan oleh Humas



Isi dari berita yang dibagikan Humas ke grup gabungan wartawan memuat rangkuman poin-poin penting kegiatan. Untuk proses selanjutnya yakni penyebarluasan bahan publikasi ke media. Poin-poin yang dibagikan oleh Humas kemudian di olah oleh wartawan hingga menghasilkan sebuah berita jurnalistik. Setelah di posting di media online kemudian anggota grup atau wartawan yang berposting di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengirimkan link berita yang telah di update di media masing-masing.

Gambar 4.4

Bukti postingan berupa link berita oleh wartawan media *online*



1.1.2. Bagian desain berita publikasi *online* Humas

Pengelolaan media pada kualifikasi kedua yaitu pada bagian desain berita publikasi *online* Humas . Bagian desain bertanggung jawab atas tampilan *website* DPRD. Sebagai salah satu instansi pemerintah, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga membutuhkan media penyampaian informasi kepada publik guna menyampaikan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai DPRD Sulawesi Selatan. Salah satu cara yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menggunakan media online melalui portal berita dan *website*. Selain portal berita, Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menggunakan *website* sebagai media penyebaran dan penyampaian informasi kepada publik. Pengelolaan informasi pada website DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan–kegiatan terkait yang nantinya dapat diterima oleh masyarakat atau publik menurut M. Jabir, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, isi pesan atau konten jelas mempengaruhi. Dalam konten, dapat menentukan apakah pembaca mengerti informasi yang ingin disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

“Yang biasa kita update ke *website* itu adalah artikel tulisan dari hasil liputan kita, kemudian foto-foto yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dewan dan tamu-tamu penting, serta hasil-hasil rapat.”(Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Apa yang disampaikan oleh Mahyuddin, juga sama seperti yang dikatakan oleh Syamsiah, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan sebagai berikut :

“Biasanya ketika staf yang ditugaskan untuk peliputan seperti Achmad Adam Abdullah dan Muh. Imran Saputra, usai acara mereka langsung buat rilis berita beserta dengan fotonya.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Hal serupa juga disampaikan oleh Muh. Imran Saputra, Staf Humas yaitu :

“Kalau selesai acara kita dari Humas juga ikut wawancara dengan anggota DPRD bersamaan dengan wartawan. Habis itu kita tulis mi beritanya. Setelah beritanya jadi langsung kita kirim ke Asrul Nurdin untuk naikan ke *website*, begitu ji.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya isi konten yang di update.

Tiap kata yang di bagikan dapat mempengaruhi *mindset* pembaca.

Dalam pengelolaan informasi, pasti ada yang bertanggung jawab didalamnya. Hal ini dituturkan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

“Yang bertanggung jawab pasti Subbagian Humas, tapi secara khusus tanggung jawabnya kelolanya itu di Asrul Nurdin, konten-konten, program, dan tampilannya dia semua yang urus untuk di *up di website*.”(Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Setiap konten atau program yang dibuat oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki publik sasaran untuk menerima informasi yang diberikan melalui *website* resmi dprd.sulselprov.go.id, dalam hal ini publik yang dimaksud yaitu publik internal yang bekerja di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan publik eksternal yaitu masyarakat umum.

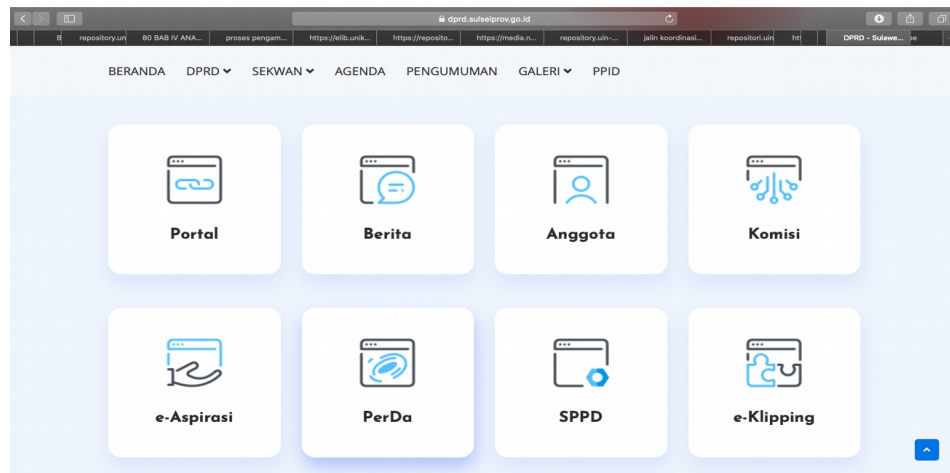
Seperti yang dituturkan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas, dan Asrul Nurdin staf Humas mengenai website bahwa:

“Bentuk *website* kita terbuka, semua orang bisa mengaksesnya. Publik bisa mengakses konten dan program yang sudah di kemas sedemikian rupa didalam *home website*.”(Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

“Banyak konten yang ditawarkan di home website untuk diakses publik, misalnya profil DPRD, profil Sekretariat Dewan, agenda anggota Dewan, galeri kegiatan, berita-berita Humas, PerDa, SPPD, *E-kliping*, serta masyarakat juga bisa melakukan aspirasi secara *online* melalui program *E-Aspirasi*.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Gambar 4.4

Beranda *Website* DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: <https://dprd.sulselprov.go.id>

Penulis bisa menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan penyusunan program dan konten-konten *website* DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berlandaskan pada tujuan dan sasaran publik yang diinginkan. Jadi, pembuatan program tersebut mempunyai landasan yang jelas dalam mempertahankan media informasi yang digunakan.

Dalam pengelolaan informasi melalui media *website*, permasalahan dalam pengelolaan informasi pun tidak akan bisa di hindarkan. Hal tersebut dapat dialami oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan yang menggunakan media *website* sebagai media penyebaran informasi bagi publik.

Hal serupa juga dialami oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola informasi melalui *website* resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Permasalahan biasanya terkait *bandwidth* (jumlah maksimal dari konsumsi transfer data internet) kita terbatas dan tidak semuanya bisa lancar di setiap jamnya, karena *bandwidth* internetnya terbatas di jam-jam tertentu. Jaringannya juga bukan kita yang kelola, tapi Kominfo, jadi kita mesti melapor dulu mungkin 3-4 hari baru pulih kembali.” (Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Syamsiah, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan melanjutkan:

“Itu sih biasanya masalah paling sering terjadi, kalau ada kegiatan tentunya publikasinya kita tidak bisa posting di hari pertama, kita mesti menunggu sampai 4 hari pengerjaan *web* baru kita *share* beritanya.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Hal ini, dituturkan pula oleh Asrul Nurdin, staf Humas sekaligus juga penanggung jawab bagian desain yang ditugaskan khusus mengelola *website*, untuk memperkuat pendapat yang diutarakan oleh Mahyuddin dan Syamsiah terkait permasalahan yang didapati dalam penyebaran informasi dan publikasi melalui *website*.

“Persoalannya itu di kekuatan *web*, ada masa masa tertentu kita tidak bisa akses *web* karena lagi dalam masa pembaharuan dan waktunya tidak pasti. Bisa seminggu, bisa lebih dari seminggu untuk melakukan pembaharuan.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2021).

Asrul Nurdin menambahkan bahwa:

“Itu baru dari *webnya*, kendala lain ada lagi seperti SDM, kita merasa SDM kita itu dari segi jumlah masih kurang ideal, dari segi pendidikan maupun pelatihan–pelatihan untuk menajamkan keahlian menulis berita dan foto juga bisa dibilang minim sekali. Kadang press rilis yang saya terima sangat lambat, biasanya saya tidak di post mi kalau pemberitaannya sudah lewat berhari-hari. Yang bagian lapangan kadang na kumpul dulu atau diminta pi beritanya baru na kirim. Itu dia imbasnya, kalau *updateannya* lamban, Humas bukan menjadi pemberi informasi tercepat bagi pembaca *website*.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Dalam pendistribusian informasi melalui website, kendala-kendala yang dialami Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat menghambat pengerjaan ataupun publikasian yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dampak dari permasalahan yang terjadi membuat *website* resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai sebagai media penyebaran informasi bagi masyarakat.

Tujuan yang diinginkan oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yakni menjadikan *website* DPRD Sulawesi Selatan sebagai media penyebaran informasi kepada publik belum mencapai tujuannya. Hal ini diakui oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Saya menyadari tujuan kita belum tercapai, masih perlu kerja keras lagi dan memang harus ditingkatkan lagi untuk *website* ini. Karena kalau dilihat dari skala beritanya masih sedikit *viewer* nya karena *website* itu dibuat sebenarnya bertujuan sebagai media utama yang kita miliki untuk menyebarkan informasi. Jadi, maunya Humas DPRD itu media lain seperti media cetak dan media sosial ya hanya sekedar sebagai media pengunjang saja.”(13 Februari, 2021)

Hal serupa pun juga diutarakan oleh M. Jabir, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Kalo tujuan sih mungkin belum tercapai, karena sekarang kan *trendnya* orang memiliki *smarthphone* itu semakin banyak, masyarakat itu cenderung menggunakan sosial media seperti *instagram*, *facebook* dan lain lain dibandingkan membuka *website*. Karna biasanya kan orang mikirnya buka *website* itu ribet. Apalagi, kalau *websitenya* kurang menarik. Tentunya yang melihat pun akan kurang. Walaupun penggunaan *website* sebenarnya bisa lebih efektif dibandingkan kita memuat berita di media cetak yang tergolong lebih mahal.”(Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Seperti yang disampaikan pula oleh Reni Juliani, ibu rumah tangga yang biasa mengkonsumsi informasi melalui online yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi bahwa:

“Kalau tujuan sih sebenarnya belum ya, kalau saya lihat ya *websitenya* itu lumayan bagus karena lengkap. Cuma ya tergantung orangnya aja kali ya. Maksudnya mengakses apa gitu, Cuma kalau untuk kontennya sendiri cukup lengkap. Tapi kalau yang saya lihat dari pembacanya kayaknya banyak yang kurang berminat gitu.”(Hasil wawancara, 24 Maret 2021).

Qudratullah, selaku Dosen Komunikasi di IAIN Bone menuturkan pendapatnya bahwa:

“Di era seperti ini sih kurang sih, karena masyarakat itu lebih prefer ke media sosial dibandingkan *website* karena dalam membukanya juga lebih ribet dan dari segi tampilan *website* tergolong membosankan jadi menurut saya tidak tercapai tujuan dari hal informasi dan publikasi ke masyarakat.” (Hasil wawancara, 24 Maret 2021)

Dari pernyataan tersebut, tujuan yang diharapkan oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai apa yang diinginkan. Bahkan, masyarakat lebih menggunakan sosial media yang terintegrasi di dalam *website* resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari informasi tentang instansi tersebut.

Adanya kendala yang dialami oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan informasi pada *website*. Maka Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan punya cara sendiri untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini dikatakan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Oh kita punya banyak kanal untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat. Tidak hanya *website* kita punya *facebook* dan *instagram*, kita juga memanfaatkan beberapa portal berita media *online* dan cetak yang berposting di Sekretarat DPRD sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan masyarakat.”(Hasil wawancara, 22 Februari 2021)

Dalam hal ini, diluar dari kurangnya masyarakat yang mengakses *website* sebagai saluran publikasi Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Humas tentu memiliki keunggulan, salah satunya yang disebutkan oleh Syamsiah selaku Kabag Persidangan dan Perundang-undangan yaitu :

“*Simplenya, website* menurut kita itu media yang terbilang mudah di akses, dan karena dibuat dan dikelola oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka informasi ditampilkan di *website* DPRD Sulawesi Selatan tentulah sangat akurat dan terpercaya di masyarakat.”(Hasil wawancara, 15 Februari 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahyuddin, Kasubag Humas yaitu :

“Website dikelola dan digunakan oleh internal Humas, keseluruhan informasi dari *website* tersebut yang dapat dipercaya oleh masyarakat.”(Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Pandangan masyarakat terhadap pengelolaan informasi pada *website* disini bertujuan untuk memberikan informasi kepada sebagai pengguna *website* terlibat didalam pemberian informasi yang diinformasikan melalui *website* resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Nur Marwah, mahasiswi Pascasarjana UIN Alauddin ini menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya tidak adaji masalahnya dengan itu, cuma mungkin lebih di *improve* lagi supaya masyarakat lebih tertarik dan berminat untuk melihat mengakses *website*.”(Hasil wawancara, 24 Maret 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Syarifah Kinanggi dan Isnaniyah Nurdin yang menjadi narasumber Penulis, yaitu:

“Kalau zaman sekarang orang-orang sudah pada malas baca buku, nah *website* jadi salah satu media efektif sih karena selain akurat juga memudahkan untuk mengakses informasinya kalo menurut saya. Tapi mungkin harus diupdate terus infonya,”(Hasil wawancara, 23 Maret 2021).

Dalam hal ini, pandangan masyarakat mengenai pengelolaan *website* resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil disimpulkan yaitu masyarakat membutuhkan adanya perubahan dan peningkatan tampilan dan isi konten dari apa yang sudah ada pada laman *website* DPRD agar lebih menarik para pembaca.

1.2 Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online* di Era Digital Informasi

Perkembangan digital informasi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengimplementasi tugas Humas. Humas selaku ujung tombak informasi pemerintah diwajibkan agar dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Hal itu dapat terwujud bila memanfaatkan teknologi sebagai media informasi dan publikasi. Pengembangan dari media massa ke media *online* sebagai sarana untuk penyebaran informasi ke publik juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Subbagian Hubungan Masyarakat,

Protokol, dan Publikasi. Media *online* berupa portal berita dan website menjadi salah satu kunci agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

Pada paparan di Bab I, tercatat sembilan portal media *online* yang berposko di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu SulselEkspress.com, IniPasti.com, SulselSatu.com. Djournalist.com, Rakyatku.com, Trotoar.id, IniKata.com, MitraPol, dan BeritaSulsel serta website yang dikelola Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tersebut, jumlah publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media *online* masih minim publikasi. Ada lima portal media *online* yang memuat kurang dari sepuluh berita selama tiga bulan terakhir padahal media tersebut sudah terdaftar berposting di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sejatinya, sebuah instansi atau lembaga pemerintah melakukan aktivitas publikasi minimal satu berita perhari di media *online*. Keaktifan Humas dalam mengelola media *online* sangat diperlukan dalam hal ini. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola media *online*, diantaranya:

1.2.1. Humas hanya sebatas fasilitator

Tidak hanya portal berita, *website* resmi DPRD Sulawesi Selatan yang dikelola Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga minim publikasi pemberitaan. Staf Eksternal Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Achmad Adam Abdullah berdalih bahwa peran, fungsi, dan tugas Humas hanya sebatas memfasilitasi anggota dewan yang ingin menyalurkan informasi dan publikasi di media:

“Sebenarnya kami tidak punya tugas pokok dan fungsi untuk meliput. Kami hanya memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di bidang kehumasan dan publikasi kami hanya mengundang wartawan untuk meliput kegiatan tersebut.” (Hasil wawancara, 18 Februari 2020) (Wawancara April 2018).

Achmad Adam Abdullah, Staf Humas mengatakan bahwa Humas tidak memiliki tugas utama dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan kedewanan. Tugasnya hanya mengundang media untuk hadir dan mempublikasikan kegiatan Anggota Dewan di media.

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Subbagian Humas, Protokol dan publikasi, Mahyuddin.

“Humas bertindak sebagai fasilitator dalam artian bahwa berbagai kegiatan atau kebijakan yang dilakukan dewan, Humas selalu menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dewan, mengkoordinasi dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan pers serta melakukan pengelolaan *website*. Keterampilan dalam mengumpulkan dan menyusun bahan publikasi atau pressrilis tidak begitu wajib.” (Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Dalam wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tugas Humas hanya memfasilitasi wartawan untuk meliput suatu kegiatan sesuai dengan permintaan anggota dewan itu sendiri, terkait dalam menyusun bahan publikasi atau press rilis adalah tanggung jawab dari wartawan yang meliput.

Penulis menemukan sedikit kontradiksi antara jawaban dari Mahyuddin selaku Kassubag. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan M. Jabir selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengenai pemahaman fungsi dan tugas Humas dalam penyebarluasan informasi. M. Jabir mengatakan bahwa pada dasarnya fungsi dan tugas Humas yakni menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga:

“Fungsi dan tugas Humas diantaranya itu melakukan dokumentasi kedewanan dan membuat produk publikasi Humas berupa narasi dan foto misalnya dalam bentuk kliping, *pressrelease*, *newsletter* dan lain sebagainya. Serta dan melakukan pengelolaan website DPRD.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Namun berbanding terbalik dengan pemahaman M. Jabir selaku Sekretaris DPRD, faktanya di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Humas bertindak sebagai “pelayan” DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Humas hanya menjadi fasilitator DPRD dalam hal publikasi kegiatan dewan ke media-media. Humas tidak memiliki kewajiban untuk membuat bahan publikasi seperti *pressrilis* yang menjadi tugas dan fungsi

Humas. Hal itu dikatakan oleh Achmad Adam Abdullah, Staf Humas bahwa:

“Proses penyebarannya (Publikasi kegiatan DPRD) yakni dengan mengundang dan mengizinkan mereka meliput secara langsung kegiatan tersebut.”(Hasil wawancara, 18 Februari 2021).

Meski Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya menganggap tugasnya hanya sebatas “menjembatani” antara DPRD dengan masyarakat, Humas DPRD selalu membuat *pre press rilis* dengan menyusun poin-poin penting publikasi di setiap agenda kegiatan yang akan dipublikasikan oleh media demi meminimalisir terjadinya *misskomunikasi* serta citra buruk instansi.

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan Humas tidak memiliki kewajiban untuk menyusun bahan publikasi, pemahaman Humas mengenai kepenulisan berita jurnalistik terbilang kurang.

Gambar 4.5

Berita yang dikelola dan diposting Humas melalui *website*

DPRD Prov. Sulsel



Sumber: dprd.sulselprov.go.id

Berita yang baik sejatinya memenuhi unsur kejournalistikan yakni 5W + 1H (*What, when, where, why, who and how*). Namun, unsur tersebut jarang dipenuhi dalam berita yang disajikan di *website* DPRD.

Peranan Humas yang belum maksimal dalam hal informasi dan publisitas diakui oleh Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Humas sepatutnya berupaya untuk menyebarkan informasi kinerja hingga prestasi DPRD sebanyak-banyaknya:

“Humas itu lembaga representasi masyarakat, makanya peranannya sangat strategis karena menjadi wadah untuk mempublikasikan semua aktivitas kedewanan. Kan masyarakat perlu tau anggota dewan itu ngapain aja, apakah aspirasi masyarakat itu diperjuangkan atau tidak, nah *channel*nya untuk bisa sampai ke masyarakat itu melalui Humas. Oleh karena itu Humas harusnya selalu aktif mengupdate beritanya.” (Hasil wawancara, 27 Mei 2021).

Hal senada juga dikatakan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jabir bahwa diperlukan keaktifan Humas dalam hal publikasi pemberitaan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“Setidaknya ada minimal 1 berita/ informasi yang diposting di media *online* tiap harinya, apalagi kalau ada kegiatan misalnya rapat itu harusnya lebih banyak publikasi. Lebih banyak lebih bagus kan.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Humas harus lebih giat dalam mempelajari dan mengikuti perkembangan menurut Syamsiah, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:

“Kalau dibilang baik ya tidak juga memang masih harus belajar, agar kekurangan kita bisa teratasi. Ilmu tentang publisitas

berkembang terus, kita harus mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Karena itu tidak bisa kita katakan sudah baik. Yang belum terlaksana baik itu saat ini adalah kurangnya staff yang berkompeten, anggaran masih harus ditambah dalam arti masih minim, sarana prasarana harus dilengkapi, pendidikan mengenai keahlian publisitas maupun formal harus lebih baik agar berkualitas.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2021)

Ketidak aktifan Humas dalam hal publisitas juga turut diakui oleh pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam daftar evaluasi pimpinan.

“Inikan baru mau masuk di tahun kedua kepemimpinan. Kalau soal publikasi media ini sudah masuk dalam daftar evaluasi. InshaAllah segera akan kita benahi menjelang tahun kedua ini.”(Hasil wawancara, 27 Mei 2021)

Tidak maksimalnya kinerja Humas dalam hal informasi dan publikasi DPRD Sulawesi Selatan juga turut dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut berdasarkan wawancara ke enam orang yang Penulis anggap representatif mewakili opini publik. Dari keenam informan tersebut, semua menjawab jarang membaca berita seputar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian Peneliti melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mengenai konten atau isu yang pernah informan baca mengenai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Qudratullah menjawab:

“Berita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah saya baca mengenai Usulan Pemakzulan Gubernur Sulawesi Selatan serta berita mengenai demonstrasi Pansus menolak pemakzulan tersebut setelah itu sudah tidak ada lagi.”(Hasil wawancara, 24 Maret 2021).

Namun berbanding terbalik dengan Qudratullah, Syarifah Kinanggi kerap membaca informasi positif Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media *online*:

“Terakhir itu yang pernah saya baca mengenai Reses Anggota DPRD dan Kinerja DPRD Sulsel terkait Penanganan Pandemi Covid-19.” (Hasil wawancara, 24 Maret 2021).

Berita yang disajikan Humas DPRD Sulawesi Selatan di media *online* bagi publik dianggap sebagai hal yang aktual menurut Nur Marwah:

“Jaman sekarang masyarakat sudah pintar memilah berita. Publik bisa tahu kapan berita tersebut dibuat melalui tanggal yang tercantum di beritanya.” (Hasil wawancara, 24 Maret 2021)

Terkait dengan jenis media yang paling sering dibaca oleh publik, Reni Juliani mengatakan bahwa portal media *online* merupakan saluran yang kerap ia baca untuk mengakses berita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya biasa akses berita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di portal berita *online* seperti IniPasti.com dan IniKata.com karena menjadi representasi media di Sulawesi Selatan yang terpercaya dan aktual.” (Hasil wawancara, 24 Maret 2021)

Selain itu Muchtar Lutfi juga menjawab:

“Kadang di Rakyatku.com, tergantung apa yang muncul di layar pemberitaan dan jadi trending topic alias *hot issue* di masyarakat Sulsel.” (Hasil wawancara, 23 Maret 2021).

Informasi dan Publikasi seputar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dianggap penting bagi publik. Menurut Isnaniyah Nurdin, dengan adanya hal tersebut, masyarakat bisa memfollowup Anggota DPRD yang menjadi wakil aspirasi masyarakat.

“Untuk melihat sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diserap untuk kemudian disosialisasikan dan dituangkan dalam kebijakan yang berpihak sesuai kebutuhan.”(Hasil wawancara, 23 Maret 2021).

1.2.2. Kurangnya keterampilan menulis

Tugas Humas yang terbilang kompleks sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan *skill* yang mumpuni dibidang manajemen kehumasan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jabir:

“Staf Humas yang ada di DPRD tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Dalam artian bahwa pengetahuan staf Humas akan dunia kehumasan masih terbilang kurang. Hampir semua staf Humas belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literatur, forum kehumasan, dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2021).

Humas Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Seorang Humas wajib memiliki karakter yang baik dalam kemampuan manajerial maupun teknis, komunikator, motivator, serta kemampuan untuk mengevaluasi program kerja dan lainnya, hal tersebut didapatkan salah satunya melalui bimbingan teknis atau bimtek. Menurut Achmad Adam Abdullah, Staf Eksternal Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selama lima tahun bekerja di Humas, ia hanya satu kali mengikuti bimbingan teknis yang digelar Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Latar belakang saya Sarjana Manajemen. Sejak 2016 saya bekerja di Humas saya belajar membuat rilis dan teknik fotografi secara otodidak. Barulah Desember 2020 kemarin ikut pelatihan penulisan rilis bersama awak wartawan yang digelar Sekretariat

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.” (Hasil wawancara, 18 Februari 2020)

Selain kurangnya pengetahuan tentang kehumasan, kurangnya jumlah staf teknis kehumasan baik itu perilis maupun fotografer juga menjadi salah satu kendala kurangnya publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media *online* berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Adam Abdullah, Staf Eksternal Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“Dibagian lapangan hanya ada dua orang sedangkan jumlah komisi di DPRD Sulawesi Selatan ada 5. Tidak jarang komisi-komisi tersebut mengadakan kegiatan di hari yang sama. Yah pintar-pintarnya kita saja yang membagi diri dan waktu”. (Hasil wawancara, 18 Februari 2020).

Komitmen dari pimpinan tertinggi juga menjadi penunjang dalam mendukung kebijakan terbentuk, terpelihara dan meningkatnya citra dan reputasi positif Humas. Diluar dari masalah SDM yang kurang berkompeten, dilihat dari sarana yang disediakan, staf Humas hanya menjalankan dari apa yang telah disediakan.

Turut dipaparkan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang tengah dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag. Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahyuddin yakni salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Salah satunya itu yang baru-baru ini kita gelar Desember 2020 kemarin yakni Bimtek kehumasan bersama awak wartawan agar

Staf Humas bisa belajar membuat rilis dan foto jurnalistik yang bagus demi mendorong peningkatan kompetensi untuk petugas agar staff Humas dapat agar penyaluran informasi dan publikasi ke masyarakat dapat berjalan dengan lancar”. (Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

Staf Internal Humas, Asrul Nurdin menyampaikan kesesuaian informasi yang sebelumnya diutarakan Kasubag. Humas, Protokol. Dan Publikasi terkait upaya dalam menuntaskan hambatan yang terjadi:

“Pak Kasubag katanya sudah mengusulkan. Yah sejauh ini kita hanya bisa menunggu dan memaksimalkan yang sudah ada, begitu juga dalam hal pemberitaan, kita cuma bisa meminta bantuan dari rekan-rekan wartawan dalam hal publikasi.” (Hasil wawancara, 22 Februari 2020).

1.2.3. Fasilitas penunjang kurang memadai

Media *online* yang menjadi saluran yang paling efisien di era digital seperti sekarang ini, salah satu tantangan yang mendasar menurut Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mengenai kurangnya sarana fasilitas yang memadai yang mendukung tugas kehumasan dalam melakukan liputan berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Imran Saputra, Staf Eksternal Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“Yang paling inti itu alat. Kamera di Humas hanya ada dua buah, hasil gambarnya juga tidak terlalu bagus karena dipakai sejak 2016 lalu, belum ada pergantian alat sampai sekarang.” (Hasil wawancara 15 Februari 2020).

Achmad Adam Abdullah, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menambahkan:

“Komputer yang kita pake sehari-hari untuk membuat rilis dan simpan file foto juga sudah kelebihan data dan tak jarang error. Bagaimana tidak, komputernya dari tahun 2012 sampai sekarang belum diganti-ganti”. (Hasil wawancara, 18 Februari 2020).

Segala macam cara telah tempuh Kasubag. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahyuddin, dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan media *Online* di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam menginformasi dan mempublikasikan aktifitas DPRD:

“Sudah diusulkan semua itu, termasuk penambahan infrastruktur. Tapi apa daya, karena Covid-19 kan, banyak anggaran yang di pangkas. Sabar-sabar mi saja dulu.”(Hasil wawancara, 13 Februari 2021).

1.2.4. Minimnya anggaran

Persoalan anggaran menyebabkan pergerakan Humas masih terbatas. Penulis melihat ada masalah yang dihadapi oleh Humas terhadap relasi mereka dengan media dimana Humas Sekretariat DPRD belum terikat dengan media manapun. Hal itu dikatakan oleh Asmira, Staf Internal Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Sejauh ini Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengikat wartawan melalui kerjasama media atau MOU. Humas hanya mengundang media yang berposting di Sekretariat DPRD bila ada kegiatan yang ingin diliput. Anggaran kita tidak cukup untuk mengcover kerjasama dengan media-media.” (Hasil wawancara 22 Februari 2021).

Tidak memadainya anggaran juga dibenarkan Mahyuddin, Kasubag. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan APBD apalagi dengan adanya pandemic covid-19 ini banyak anggaran yang dipangkas, akhirnya berpengaruh ke

Anggaran Operasional. Karena itu website DPRD kurang diperhatikan.” (Hasil wawancara 13 Februari 2021).

Penulis menganggap diperlukan adanya kerjasama yang nyata dalam bentuk Memory of Understanding (MoU) atau kontrak bisnis antara lembaga atau instansi dengan pihak media. Melalui MoU tersebut diharapkan terjalin kerjasama publikasi antara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan media-media dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan harapan agar masyarakat bisa mengetahui kinerja wakil rakyatnya.

Dalam wawancara yang telah dilakukan Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan anggaran ini menjadi sumber masalah dalam setiap pelaksanaan program publikasi Humas. Jika ditanyakan kepada pimpinan terkait masalah belum adanya pelatihan yang diberikan serta kurangnya fasilitas penunjang yang menjadi jawabannya adalah belum adanya anggaran. Anggaran ini juga erat kaitannya dengan penunjang publikasi. Dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Harga menyebutkan bahwa setiap penulisan artikel internal ada rupiah yang diberikan. Semua staf tentu menginginkan nilai tersebut, namun berkaitan dengan kemampuan mereka dalam menulis tentu belum memenuhi kriteria pimpinan sehingga perlu untuk memberikan pelatihan kemudian pimpinan dapat memberikan pemerataan beban kerja.

B. PEMBAHASAN

1. Humas dalam mengelola publikasi berita melalui media *online* pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

1.1. Bagian isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas

Berdasar pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai kinerja dari Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fasilitator DPRD Sulawesi Selatan, tolak ukur keberhasilan dan capaian kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas dari kinerja Humas. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Aktivitas Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya, memfasilitasi awak media jika ada konferensi pers, membuat pre realese baik itu berupa narasi dan gambar yang akan disebar ke wartawan serta press realese yang dimuat dalam *website*, mempublikasi berbagai kinerja dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Humas juga turut serta untuk melakukan reses dan mempublikasi kegiatan antara lain

dokumentasi, kliping koran yang memuat segala berita yang berhubungan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengelolaan media *online* bagian konten atau isi berita pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bukan tanpa perencanaan yang tidak matang, konten yang dibagikan di media *online* baik itu di portal berita maupun di *website* bisa merujuk pada permasalahan yang ditemukan di lapangan bisa pula tidak, yang paling mendasari adalah mempromosikan program kerja dan mempublikasikan hasil rapat kedewanan. Perencanaan program setiap waktu bisa berubah tergantung kondisi di lapangan mengingat padatnya kegiatan dewan

Dua orang staf eksternal yang berperan penting pada proses pengambilan data-data publikasi Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Staff tersebut juga bertanggung jawab pada perilisan berita sekaligus menjadi fotografer di setiap kegiatan kedewanan. Proses penyebarluasan berita di media *online* hampir sama dengan Humas di pemerintahan yang lain. Ada dua cara kerja Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yakni dengan mengundang langsung wartawan yang akan meliput dan yang kedua dengan mengirimkan bahan data-data publikasi pre-rilis dan foto yang sudah menjadi berita kemudian di share kepada para awak media yang berposko di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan staff pengelola website DPRD.

Sejauh ini ada 8 portal media *online* yang terdaftar berposting di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan sebuah *web* sekretariat yang digunakan sebagai saluran informasi dan publikasi Humas. Humas pertama kali memanfaatkan media *online* melalui *web* sekretariat dan portal berita sebagai saluran informasi dan publikasi Humas Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan sejak tahun 2016.

Namun, masalah yang dihadapi oleh Humas terhadap relasi mereka dengan media dimana Humas belum bekerjasama secara resmi dengan Sekretariat DPRD. Perlu ada kerjasama yang nyata dalam bentuk *Memory of Understanding* (MoU) dengan pihak media dikarenakan anggaran Humas yang tidak memadai untuk mengcover media. Sehingga fungsi Humas di Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi dan menjadi penyambung antara anggota dewan yang membutuhkan publikasi dengan awak media

Menurut peneliti, inisiatif Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari berbagai upaya dalam memfasilitasi serta keterlibatan Humas dalam menunjang kinerja DPRD sebagai fasilitator baik dalam internal instansi maupun eksternal instansi. Seorang praktisi Humas dapat bertindak sebagai penjabat penghubung atau penyedia informasi yang sering disebut *boundary manager* yakni formalisasi publikasi melalui saluran teknologi

informasi (IT) canggih dengan model sistem informasi manajemen yang dikelola secara cepat, akurat, dan informatif (Grunig dan Hunt dalam Soemirat, 2011:87). Akan tetapi, khusus pada pengelolaan dan pemanfaatan media *online*, baik itu melalui portal berita maupun *website* sebagai media informasi dan komunikasi yang berdasarkan penelitian dan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukannya dengan baik.

Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan lebih memaksimalkan kinerja mereka terhadap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, karena peran Humas adalah sebagai fasilitator DPRD Sulawesi Selatan.

Peran terbesar Humas terbesar bagi instansi atau lembaga adalah menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra sebuah instansi atau lembaga. Selain citra, hal yang lebih jauh yang perlu diperhatikan bagi Humas adalah membentuk, menjaga dan memelihara reputasi instansi atau lembaga. Krisis kepercayaan yang melanda masyarakat terhadap lembaga DPRD kian hari kian memprihatinkan. Untuk itu, maka diperlukan peran Humas yang handal untuk dapat menjaga reputasi positif kinerja anggota dewan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum, DPRD harus membuka diri selebar-

lebarnya terhadap akses rakyat sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada seluruh rakyat daerah. Oleh karena itu, penggunaan media dalam setiap kegiatan DPRD merupakan hal yang sangat *urgent*. mengenai informasi apa saja yang dipublikasikan Humas DPRD Provinsi.

Sekretariat DPRD harusnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk, di antaranya pengawasan. Dengan mendapatkan informasi yang jelas, rakyat daerah dapat memonitor berbagai hal terkait kinerja DPRD apakah sudah sesuai dengan representasi rakyat daerah. Sebagai parameter kinerja DPRD, diberikan rujukan dalam bentuk tugas dan wewenang DPRD, hak anggota DPRD, dan kewajiban anggota DPRD. Implementasi dari tugas, wewenang, hak, dan kewajiban adalah kinerja DPRD yang seharusnya dikomunikasikan secara optimal, sehingga rakyat tahu, paham, dan memberikan apresiasi, baik dalam bentuk pengakuan atas eksistensi dan prestasi DPRD maupun dalam bentuk partisipasi dengan memberikan kritik, saran, dan masukan guna penguatan kinerja DPRD.

1.2. Bagian desain berita publikasi *online* Humas

Pengelolaan media *online* pada kualifikasi kedua yakni pada bagian desain berita publikasi *online* Humas. Pada bagian ini bertanggung jawab atas tampilan website DPRD. Setelah mendapatkan bahan berita, kemudian di “ramu” setelah itu dibagikan di *website*. Berita berupa narasi,

foto, video, dan infografis merupakan konten yang dominan diposting di website Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejalan pada pembahasan teori *Cyber* Publik Relation menurut (Onggo, 2014:6) bahwa pemanfaatan media *online* dan *website* untuk kepentingan PR merupakan penghematan besar atas biaya kertas, cetak dan pengirimannya, hal tersebut juga dijalankan oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menekan biaya atas minimnya anggaran publikasi.

Perkembangan internet atau media *online* pada saat ini memang sangat pesat-pesatnya. Internet tidak hanya memperkecil jarak dalam mengkomunikasikan pesan, teknologi komputer dan internet juga telah berkembang dan mengeliminasi penggunaan koneksi kabel, namun tetap bias memfasilitasi taransmisi informasi yang snagat cepat ke seluruh dunia (Bagdakian, 2004:114). Sejalan dengan hal tersebut, Humas DPRD Sulawesi Selatan meyakini kehadiran internet membawa kemudahan bagi Humas dalam melakukan aktifitas komunikasi dengan publik tanpa adanya jarak ruang dan waktu. Media *online* memberikan ruang yang lebih untuk terjadinya interaksi yang melibatkan adanya umpan balik. Untuk itu Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkannya dengan menjadikan sebagai saluran publikasi Humas DPRD. Media *online* juga memudahkan khalayak untuk mengakses informasi, baik peristiwa yang terjadi di sekitar maupun yang jauh dan yang paling

penting media *online* bisa meraup pembaca terbanyak dibanding media-media lain

2. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online*

Pengembangan dari media massa ke media *online* sebagai sarana untuk penyebaran informasi ke publik dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi. Sudah menjadi perhatian umum bahwa media *online* seperti portal media dan website menjadi salah satu kunci agar bisa menjangkau masyarakat.

2.1. Humas hanya sebatas fasilitator

Keberadaan Humas pemerintah sangatlah penting dalam menyampaikan informasi mengenai kebijaksanaan kepada publik karena publik berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas dan program kerja suatu instansi/lembaga berdasarkan keadaan, harapan-harapan, keinginan- keinginan publik sebagai sasarannya (Ruslan, 1999:34). Bila dikaitkan dengan pemanfaatan media *online*, Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sudah menjalankan sebagaimana pemanfaatan media *online* ini untuk sarana menginformasikan kebijakan, aktivitas dan program kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Humas juga berperan

sangat penting dalam menunjang kinerja dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi dalam keterlibatan publik sebagai pengguna *online*, hal ini belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan yang dikatakan Ruslan.

Berbeda halnya, staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bahwa peran, fungsi, dan tugas Humas hanya sebatas memfasilitasi anggota dewan yang ingin menyalurkan informasi dan publikasi di media saja, Penulis menyimpulkan pandangan tersebut yang menjadi salah satu faktor minimnya jumlah publikasi media *online* DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Humas bertindak sebagai fasilitator dalam artian bahwa berbagai kegiatan atau kebijakan yang dilakukan dewan, Humas selalu menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dewan, mengkoordinasi dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan pers serta melaksanakan pengelolaan *website*.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Ruslan (2002:32) bahwa Humas pemerintah menekankan pada public service, maka pengelolaan dan pemanfaatan media *online* oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa dikatakan memenuhi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari pemanfaatan media *online* yang digunakan Humas sebagai sarana informasi dan publikasi

yang belum maksimal sebagai media pelayanan publik karena Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan lebih memaksimalkan dan memprioritaskan fungsi atau tugas mereka kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemahaman Humas hanya sebatas fasilitator antara anggota DPRD dan media tidak bisa dijadikan pembenaran atas kurang maksimalnya publikasi Humas di media *online*. Hal itu berarti Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya bertindak sebagai “pelayan” DPRD Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pandangan tersebut kontradiktif dengan konsep keterbukaan informasi yang saya bangun menggunakan pemahaman saya tentang undang-undang keterbukaan informasi. Undang-undang keterbukaan informasi No. 14 Tahun 2008 mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dimiliki oleh badan publik terkait penyelenggaraan Negara. Penulis memandang bahwa sudah menjadi kewajiban organisasi perangkat daerah menyediakan informasi terkait penyelenggaraan Negara. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa Negara bekerja untuk mereka.

Ada tiga informasi yang perlu untuk diberikan kepada publik (Lewis, 1980). Pertama adalah informasi operasional yaitu informasi yang menunjukkan aktivitas organisasi, kedua adalah informasi *regulatory* yaitu informasi terkait sikap organisasi yang sudah dibingkai terhadap suatu isu dan ketiga adalah *maintenance* dan *development information* yaitu

informasi terkait perkembangan sikap organisasi terhadap isu. Ketiga informasi yang diberikan disediakan oleh organisasi melalui Humas mereka. Peraturan pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik No. 14 tahun 2008 menuliskan bahwa informasi terkait penyelenggaraan Negara disediakan oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). Humas sekretariat DPRD menjalankan perannya sebagai PPID sekretariat DPRD. Informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas DPRD diberikan oleh Humas kepada masyarakat melalui perantara media. Tujuan akhir dari informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah agar Anggota DPRD dan lembaga DPRD mendapatkan kredit terkait pekerjaan yang mereka lakukan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sesuai dengan opini penulis bahwa informasi yang disediakan oleh Humas merupakan wujud dari aktivitas dalam membangun citra positif Anggota DPRD dan Lembaga DPRD itu sendiri. Penulis berpandangan bahwa pernyataan Kepala Subbagian Humas, bahwa Humas tidak memiliki tugas utama dalam melakukan peliputan dapat dipertanyakan. Pergub No. 52 Tahun 2016 pasal 13 huruf (e) menyebutkan bahwa Humas memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan data untuk kegiatan informasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik serta media lainnya. Penulis memandang bahwa Humas memiliki fungsi utama menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan

informasi dan publikasi. Bahan dan data yang dibutuhkan oleh humas berbentuk foto dokumentasi kegiatan maupun rilis yang berisi informasi kunci terkait suatu isu atau aktivitas. Keterangan Kepala Subbagian Humas tidak sesuai dengan implementasi Pergub tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan yang diikuti oleh Staf Subbagian Humas.

2.2. Kurangnya keterampilan menulis

Fungsi Humas secara struktural pemerintahan merupakan sebuah bagian integral yang tidak terpisah dari suatu instansi atau kelembagaan. Humas harusnya lebih giat dalam mempelajari dan mengikuti perkembangan global. Tugas Humas yang terbilang kompleks sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan skill yang mumpuni. Staf Humas yang ada di DPRD tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Dalam artian bahwa pengetahuan staf Humas akan dunia kehumasan masih terbilang kurang. Staf Humas belajar membuat rilis dan teknik fotografi secara otodidak.

Grunig, et al menempatkan *knowledge* sebagai salah satu premis yang perlu dipenuhi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi Humas yang semakin dinamis, hal ini tentu didorong oleh perkembangan teknologi dan informasi. Menurut Juariyah (2016) bahwa perkembangan teknologi menyebabkan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali.

Penulis memandang hal ini perlu menjadi perhatian agar Humas dapat dipersiapkan menghadapi hal tersebut.

Humas Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Seorang Humas wajib memiliki karakter yang baik dalam kemampuan manajerial maupun teknis, komunikator, motivator, serta kemampuan untuk mengevaluasi program kerja dan lainnya, hal tersebut didapatkan salah satunya melalui bimbingan teknis atau bimtek

Selain kurangnya pengetahuan tentang tata kerja Humas, kurangnya jumlah staf teknis kehumasan baik itu perilis maupun fotografer juga menjadi faktor kurangnya publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media *online*.

Menurut Kriyantono (2014) berbagai kalangan telah menggunakan media *online* sebagai media promosi, penjualan, hingga memberi informasi yang mendetail mengenai gambaran suatu instansi atau lembaga. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meyakini Kriyantono dalam teori Cyber Publik Relation tersebut dengan menjadikan media *online* berupa berita portal dan website sebagai sarana informasi dan publikasi.

2.3. Fasilitas penunjang kurang memadai

Berbicara soal tantangan Humas dalam penyebaran berita di media *online* yang menjadi saluran yang paling efisien di era digital seperti

sekarang ini, faktor penghambat selanjutnya yakni kurangnya sarana atau fasilitas memadai yang mendukung tugas kehumasan dalam melakukan tugas penyebaran informasi kegiatan peliputan keseharian dewan seperti kamera dan komputer. Komputer yang digunakan untuk mengelola website terbilang sudah kurang layak dan tak jarang error sedangkan kualitas gambar dua buah kamera yang digunakan staff Humas juga terbilang kurang bagus karena sarana tersebut sudah digunakan dari tahun 2012 namun belum ada pergantian sampai saat ini.

Masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian lebih kemudian dibenahi dan disempurnakan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terkait tugas dan fungsinya sebagai mediator dan publisitas. Di era digital seperti saat ini bentuk penyampaian informasi *Cyber Public Relation* salah satunya melalui situs website DPRD dimana informasi diperoleh dapat lebih cepat, efektif dan efisien diterima oleh masyarakat namun belum dimanfaatkan dengan baik oleh Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan. Selain yang telah dijabarkan diatas, ketidaktersediaan anggaran untuk *website* juga menjadi faktor inti dalam hal ini.

2.4. Minimnya anggaran

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan APBD apalagi dengan adanya pandemik covid-19 ini banyak

anggaran yang dipangkas, akhirnya berpengaruh ke Anggaran Operasional. Oleh karena itu *website* DPRD kurang diperhatikan.

Komitmen dari pimpinan tertinggi juga menjadi penunjang dalam mendukung kebijakan terbentuk, terpelihara dan meningkatnya citra dan reputasi positif Humas. Diluar dari masalah SDM yang kurang berkompeten, dilihat dari sarana yang disediakan, staf Humas hanya menjalankan dari apa yang telah disediakan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Humas untuk menyelesaikan hambatan yang tengah dihadapi yakni dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan digelarnya Bimbingan Teknis, mengajukan pengusulan penambahan staf, penambahan anggaran operasional dan penambahan infrastruktur.

Menurut Onggo (2004) bila dikelola dengan baik, *Cyber Public Relations* menghasilkan apa yang disebut sebagai 3R bagi perusahaan, yaitu Relations, Reputasi, dan Relevansi. Humas sudah berupaya berinteraksi dengan masyarakat sebagai target audience dengan mempublikasikan kegiatan DPRD di portal media *online* dan website untuk membangun hubungan atau citra lembaga/instansi namun pengembangan *Cyber Public Relation* melalui media *online* berupa portal berita dan website lembaga nyatanya belum maksimal dikembangkan oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran operasional dan penambahan infrastruktur.

Berdasarkan olah data penelitian bahwa penyebab pengelolaan publikasi media *online* tidak maksimal pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pemahaman Humas hanya sebatas fasilitator antara anggota DPRD dan media saja, anggapan itu artinya Humas tidak memiliki tugas utama dalam melakukan peliputan. Pandangan tersebut kontradiktif dengan Undang-undang keterbukaan informasi No. 14 Tahun 2008 dimana Penulis memandang bahwa sudah menjadi kewajiban organisasi perangkat daerah menyediakan informasi terkait penyelenggaraan negara, hal tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa mereka bekerja untuk masyarakat. Faktor kedua adalah SDM yang kurang mempunyai dalam menulis berita. Staf Humas bukan berasal dari latar belakang kehumasan, oleh karena itu dipelatihan maupun bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas staf Humas harus lebih ditingkatkan. Nyatanya, Humas baru menggelar 1 kali bimbingan teknis untuk para staf Humas pada Desember 2021, kemarin.

Faktor ketiga adalah kurangnya jumlah staf teknik Humas baik itu penulis maupun fotografer, sarana dan prasarana seperti kamera dan komputer yang menjadi penunjang teknis publikasi nyatanya kurang memadai. Staf Eksternal yang bertugas mengumpulkan bahan publikasi dewan hanya 2 orang, staf Humas kewalahan mengcover 85 anggota dewan di 5 komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor keempat adalah ketidaktersediaan anggaran, Sekretariat DPRD mengalami

penurunan APBD yang akhirnya berpengaruh pada publikasi Humas. Tidak maksimalnya publikasi berita pada media online tidak ditampik oleh Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Para pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi selatan menjadikan persoalan informasi dan publikasi DPRD sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan menjelang tahun kedua kepemimpinan saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, terkait Analisis Penggunaan Media *Online* pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan publikasi berita melalui media *online*, Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengklasifikasi menjadi dua bagian: 1). Bagian isi pemberitaan (publikasi) media *online* Humas; dan 2). Bagian desain berita publikasi *online* Humas. Proses pengelolaan publikasi berita media *online* telah melalui perencanaan dan penerapan yang matang, namun belum mencapai tujuan yang diharapkan Humas DPRD Sulawesi Selatan.
2. Berdasarkan olah data penelitian bahwa Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online* disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a. Humas hanya sebatas fasilitator; b. Kurangnya keterampilan menulis; c. Fasilitas penunjang kurang memadai; d. Minimnya anggaran. Hal-hal penyebab Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak maksimal tersebut secara umum masih didominasi oleh faktor-faktor internal sehingga

perlu pembenahan terhadap hal tersebut agar Humas dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Humas DPRD Sulawesi Selatan yang hanya menganggap bahwa peran, fungsi, dan tugas Humas hanya sebatas memfasilitasi anggota dewan dalam hal ini Humas tidak memiliki tugas utama dalam melakukan kegiatan pengambilan data isi pemberitaan (peliputan), perlu diubah. Humas memiliki fungsi utama yakni menyiapkan bahan dan data terkait kegiatan informasi dan publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, Humas sepatutnya untuk menyiapkan bahan dan data berbentuk foto dan narasi dokumentasi kegiatan berupa *press rilis* yang berisi informasi kunci terkait suatu isu atau aktivitas DPRD. Hal ini penting diketahui agar pelaksanaan tugas dan fungsi Humas dapat berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk memperhatikan kualitas SDMnya. Petugas Humas perlu diberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin minimal satu kali dalam triwulan guna meningkatkan kualitas pelayanan kehumasan. Materi pembahasan yakni Regulasi dan Konsep Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, Dasar-Dasar Jurnalistik, Teknik Dasar Penulisan Berita,

Teknik Reportase dan Wawancara, Dasar Dasar Fotografi, Rekayasa Foto Digital (Teknik Editing dan Penyajian Foto), Praktek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Masyarakat Berbasis Informasi, Penerapan e-government dalam menunjang transparansi, efektivitas aksesibilitas, Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Bagi Pelayanan Publik, Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) serta manajemen pengelolaan *website*.

3. Pimpinan DPRD, seperti Sekretaris Dewan, Kabag. Perundang-undangan, dan Kasubag. Humas perlu memberi perhatian lebih kepada Staf Humas dengan menambah lima orang staff lapangan Humas. Dengan rincian lima orang tersebut masing-masing ditempatkan di lima komisi DPRD dan dua orang yang sudah ada *standby* bila seketika ada aspirasi masyarakat yang masuk. Tidak hanya penambahan SDM, sarana publikasi seperti seperangkat kamera dengan lensa yang canggih, komputer, smartphone dan alat penunjang kehumasan yang lainnya juga perlu dilengkapi karena Humas harus selalu *up to date* dalam menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan kedewanan oleh karena itu segala sesuatu yang menghambat pekerjaan Humas harus dapat

diminimalisir karena Humas merupakan ujung tombak informasi dan publikasi dalam meraih image positif instansi/lembaga.

4. Perlunya penambahan anggaran pada Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan yang dapat mengcover publikasi media seperti media online, media cetak, dan media elektronik yang bernilai Rp. 9 Miliar. Nilai tersebut mencakup pemberitaan pada media lokal dan nasional. Penambahan anggaran tersebut agar Humas dapat menjalankan tugasnya dalam hal penyebarluasan informasi dengan maksimal kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aceng. 2004. *Press Relations: Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Agus, Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Anderson, Rob, and Kenneth N. Cissna. 1997. *The Martin Buber-Carl Rogers Dialogue: A New Transcript With Commentary*. Albany: SUNY Press.
- Asep, Syamsul. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Aras, M. 2014. Kegiatan *government* Public Relation dalam membangun komunikasi dengan dunia pers: studi kasus humas pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Humaniora*, 5(2), 1056– 1065. <https://doi.org/1056-1065>.
- Ardianto. Soleh, Soemirat. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Azhary, Syaiful. Kriyantono, Rachmat. 2018. Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas *Online*. Diunduh pada 12 September 2020. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/267628-understanding-of-public-relation-officer-76c1c951.pdf>.
- Bagdakian, Ben. 2004. *The New Media Monopoly*. Boston: Beacon Press.
- Buber, Martin. 1970. *I and Thou*. Edinburg: T&T. Clark.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creeber, G. & Martin, R. 2009. *Digital Cultures: Understanding New Media, Berkshire-England*: Open University Press.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design* (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crespo, M. J., & Echart, N. 2011. *The Role and Functions of Government Public Relations. Lessons from Pubic Perceptions of Government*. *Central European Journal of Communication*, 1, 109-123.

- Cutlip, S. M., Center, A. H Dan Broom, G. M. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.
- Daymon, Cristine & Immy Holloway. 2002. *Metode – Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Penerbit Cahya Wiratma, Yogyakarta: Bentang.
- Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. 2002. *Excellence in public relations and communication management: A review of the theory and results*. Dalam Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. (Eds.). *Excellent public relations and effective organization*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Grunig, James E., Hunt, Todd. 1984. *Managing Public Relations*. Belmont, CA: Thompson Wadworth.
- Harlow, Rex F. 1976. *Building a Public Relations Definition*. *Public Relations Review* 2 No.4.
- Heeter, Carrie. 1988. *Communications and Information Science Series*. New York: Ablex Publishing.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Penerapan e-Government.
- Iswara, H. 2001. *Hidup Sederhana Berfikir Mulia P.K. Ojong: Satu dari Dua Pendiri Kompas-Gramedia*. Jakarta: Kompas.
- Jack Febrian, Farida Andayani. 2002. *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Bandung, Informatika.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem informasi keperilakuan*, Yogyakarta: Andi.
- John M. Echols dan Hasan Shadili. 1993. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Juariyah. 2016. Tantangan Humas Pemerintah (Government Public Relations) menghadapi Web 2.0. Dalam: Cahyono HB et al. *e-Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication*. 2016 Mar 30; Jember, Jawa Tengah. Indonesia. p. 60.
- Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations*. Edisi keempat. Jakarta. Erlangga.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

- Kriyantono, R. 2014. Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kurnia, Septiawan Santana. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lane. E.J. 1993. *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches*, London: Sage Publications.
- Lattimore, dkk. 2010. Public Relations: Profesi dan Praktik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lievrouw, L. 2011. *Alternative and Activist New Media*. Cambridge: Polity Press.
- Lim, Francis. 2008. Filsafat Teknologi : Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- McQuail, D. 2003. Teori komunikasi massa. Jakarta: Penerbit Erlangga
- McQuail, Denis. 2009. *Mass Communication Theory*. London: Stage Publication.
- Miles, M.B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Morissan dan A. C. Wardhany. 2009. Teori Komunikasi. Cetakan Pertama. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nadya,Raesya. Mahyuzar, Dr. 2018. Peran Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh Dalam Mempublikasikan Kegiatan Pimpinan Di Media *Online*. Diunduh pada 12 September 2020. *Available from:* <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11100>.
- Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Okwuchukwu, Godson, Okafor . Faith, Chinonye. Malizu. 2015. *Research Article Effective public relations and organizational management: The Bond*. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research* 2(1). Diunduh pada 12 Oktober 2020. *Available from:* <http://saspjournals.com/wp-content/uploads/2014/12/SJAHSS-26B982-987.pdf>.

- Patton, Michael Quinn. 1987. Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi(hlm. 330-331). Cetakan ke-29, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 6 Tahun 2014 tentang Pranata Humas.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Humas Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Pemerintah.
- Piliang, Yasraf Amir. 2012. Masyarakat Informasi dan Digital:Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. Jurnal Sosioteknologi Edisi 27.
- Priyatna, Chandratama, Centurion. Prastowo, Agung, Ari. Syuderajat, Fajar. Sani, Anwar. 2020. Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. Diunduh pada 24 Oktober 2020. Available from: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/26115/13418>.
- Ruben, Brent D., Stewart, Lea P. 2013. Komunikasi Dan Perilaku Manusia (EdisiKelima).Jakarta :Rajawali Pers.
- Ruslan, R. 2012. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Cetakan kesebelas. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Sari. B.W.N. 2012. Humas Pemerintah. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Seitel,Frasier. 1992. *International Editions, The Practice of Public Relations*. New jersdy Prentinee Hall.
- Setyani. 2013. Penggunaan Media sosial sebagai sarana Komunikasi bagi Komunitas.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Smith, D. Ronald. 2005. *Strategic Planning For Public Relations. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates Publisher*. London.

Sugiyono. 2010. Statistika untuk penelitian, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Sunarjo. 1985. Public Relation. Bandung: Bina Cipta.

Tench, Ralph and Yeoman, Liz. 2006. *Exploring Public Relations* (1st edition). Harlow: Prentice Hall.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.

Wilcox dan Cameron. 2006. Public Relations: *Strategies And Tactics*.

Situs Berita Online dan Internet

<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp> (Diakses pada 02 Oktober 2020)

<https://ebooks.gramedia.com/id/koran/tribun-timur/24-jul-2020> (Diakses pada 12 Oktober 2020).

<https://ebooks.gramedia.com/id/koran/tribun-timur/09-sep-2020> (Diakses pada 12 Oktober 2020).

SulselEkspress.com

<https://sulselekspres.com/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/>

<https://sulselekspres.com/sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-test-gratis-sediakan-500-kuota/>

<https://sulselekspres.com/ketua-dprd-sulsel-sambut-baik-soal-pemprov-pertahankan-raihan-wtp/>

<https://sulselekspres.com/dprd-sulsel-dukung-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://sulselekspres.com/komisi-a-dprd-sulsel-bahas-program-prioritas/>

<https://sulselekspres.com/pemprov-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-tahun-anggaran-2021/>

<https://sulseleksespres.com/putra-wakil-ketua-dprd-sulsel-berhasil-khatam-30-juz-al-quran-di-gowa/>

<https://sulseleksespres.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-beri-bantuan-korban-kebakaran-pannampu-makassar/>

<https://sulseleksespres.com/wakil-ketua-dprd-sulsel-serahkan-ratusan-ternak-sapi-di-sidrap/>

<https://sulseleksespres.com/legislator-dprd-sulsel-meninggal-dunia-ini-biografi-ince-langke/>

IniPasti.com

<https://inipasti.com/pansus-dprd-sulsel-kunker-ke-pemkab-maros/>

<https://inipasti.com/kpp-dprd-sulsel-kunjungi-rutan-perempuan-kelas-i-makassar/>

<https://inipasti.com/pimpinan-dprd-sulsel-bahas-penanganan-covid-dengan-calon-jenderal/>

<https://inipasti.com/anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal-dunia-saat-rapat-banggar/>

<https://inipasti.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-pasang-badan-untuk-taufan-pawe/>

<https://inipasti.com/pemprov-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-2021/>

<https://inipasti.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-beri-bantuan-korban-kebakaran-pannampu-makassar/>

<https://inipasti.com/putra-wakil-ketua-dprd-sulsel-berhasil-khatam-30-juz-al-quran-di-gowa/>

<https://inipasti.com/wakil-ketua-dprd-sulsel-tiga-makna-merdeka-di-tengah-pandemi/>

<https://inipasti.com/berkat-budidaya-porang-wakil-ketua-dprd-sulsel-terima-penghargaan-dari-mentan/>

<https://inipasti.com/ketua-dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-buat-program-kepemudaan/>

<https://inipasti.com/ranperda-disetujui-dprd-sulsel-harap-bawa-perubahan/>

<https://inipasti.com/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/>

<https://inipasti.com/pemprov-terima-wtp-ketua-dprd-sulsel-kita-akan-tindaklanjuti/>

<https://inipasti.com/dprd-sulsel-dukung-prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://inipasti.com/ketua-dprd-sulsel-kekuatan-leadership-pak-rudy-tentukan-penanganan-covid-19/>

<https://inipasti.com/tolak-ruu-hip-sejumlah-ormas-temui-anggota-dprd-sulsel/>

Sulselsatu.com

<https://www.sulselsatu.com/2020/10/01/politik/apt-politisi-muda-nasdem-diberi-amanah-jabat-wakil-ketua-komisi-c-dprd-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/25/opd/dprd/kaukus-perempuan-parlemen-dprd-sulsel-berbagi-dengan-warga-binaan-rutan-makassar.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/23/opd/dprd/nasdem-siapkan-mizar-roem-gantikan-pipink-di-dprd-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/15/opd/dprd/wakil-ketua-dprd-sulsel-bahas-penanganan-covid-19-bersama-calon-jendral-polri.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/08/video/video-nimatullah-ungkap-kronologi-kematian-anggota-dprd-sulsel-ince-langke.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/07/opd/dprd/komisi-a-dprd-sulsel-raker-bahas-ketersediaan-blanko-ktp.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/video/video-aksi-unjuk-rasa-di-dprd-sulsel-tuntut-wahli-tinggalkan-pulau-sangkarrang.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/berita-utama/taufan-pawe-digoyang-fraksi-golkar-dprd-sulsel-pasang-badan.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/opd/dprd/pemprov-dan-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-ppas-apbd-ta-2021.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/23/opd/dprd/dprd-makassar-dukung-rencana-pemprov-sulsel-rekrut-guru-berasal-dari-pulau.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/23/opd/dprd/dprd-makassar-dukung-rencana-pemprov-sulsel-rekrut-guru-berasal-dari-pulau.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/14/opd/dprd/dprd-apresiasi-langkah-gubernur-atasi-bencana-di-sulsel.html>

[https://www.sulselsatu.com/2020/08/06/opd/dprd/komisi-e-dprd-sulsel-
rapat-bersama-mitra-terkait-pelaksanaan-apbd-2019.html](https://www.sulselsatu.com/2020/08/06/opd/dprd/komisi-e-dprd-sulsel-
rapat-bersama-mitra-terkait-pelaksanaan-apbd-2019.html)

[https://www.sulselsatu.com/2020/07/28/opd/dprd/dprd-sulsel-ajak-knpi-
arham-basmin-kolaborasi-buat-program-kepemudaan.html](https://www.sulselsatu.com/2020/07/28/opd/dprd/dprd-sulsel-ajak-knpi-
arham-basmin-kolaborasi-buat-program-kepemudaan.html)

[https://www.sulselsatu.com/2020/07/23/berita-utama/pukat-upa-temukan-
indikasi-korupsi-anggaran-penyebaran-perda-di-dprd-sulsel.html](https://www.sulselsatu.com/2020/07/23/berita-utama/pukat-upa-temukan-
indikasi-korupsi-anggaran-penyebaran-perda-di-dprd-sulsel.html)

[https://www.sulselsatu.com/2020/07/22/hukum/pukat-temukan-indikasi-
korupsi-pernyebaran-perda-dprd-sulsel-sebesar-20-m.html](https://www.sulselsatu.com/2020/07/22/hukum/pukat-temukan-indikasi-
korupsi-pernyebaran-perda-dprd-sulsel-sebesar-20-m.html)

[https://www.sulselsatu.com/2020/07/20/makassar/dprd-setujui-ranperda-
kerja-sama-sister-province-sulsel-dengan-jepang.html](https://www.sulselsatu.com/2020/07/20/makassar/dprd-setujui-ranperda-
kerja-sama-sister-province-sulsel-dengan-jepang.html)

[https://www.sulselsatu.com/2020/07/06/berita-utama/dprd-sulsel-dukung-
cara-pemkot-makassar-cegah-penyebaran-covid-19.html](https://www.sulselsatu.com/2020/07/06/berita-utama/dprd-sulsel-dukung-
cara-pemkot-makassar-cegah-penyebaran-covid-19.html)

Djournalist.com

[http://metro.djournalist.com/read/2020/09/30/16538/dprd-sulsel-sahkan-
apbd-perubahan-2020](http://metro.djournalist.com/read/2020/09/30/16538/dprd-sulsel-sahkan-
apbd-perubahan-2020)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/09/08/16337/anggota-dprd-sulsel-
ince-langke-meninggal-saat-rapat-banggar](http://metro.djournalist.com/read/2020/09/08/16337/anggota-dprd-sulsel-
ince-langke-meninggal-saat-rapat-banggar)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/08/27/16241/gubernur-dan-dprd-
sulsel-teken-kua-ppas-2021](http://metro.djournalist.com/read/2020/08/27/16241/gubernur-dan-dprd-
sulsel-teken-kua-ppas-2021)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/08/11/16136/ketua-dprd-sulsel-
apresiasi-pemprov-asei-bina-holding-mou-investasi](http://metro.djournalist.com/read/2020/08/11/16136/ketua-dprd-sulsel-
apresiasi-pemprov-asei-bina-holding-mou-investasi)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/07/27/16063/ketua-dprd-sulsel-
ajak-knpi-arham-buat-program-kepemudaan](http://metro.djournalist.com/read/2020/07/27/16063/ketua-dprd-sulsel-
ajak-knpi-arham-buat-program-kepemudaan)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/07/06/15693/dprd-sulsel-dukung-
prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar](http://metro.djournalist.com/read/2020/07/06/15693/dprd-sulsel-dukung-
prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar)

[http://metro.djournalist.com/read/2020/07/01/15654/hut-bhayangkara-
ketua-dprd-sulsel-harap-situasi-kamtibmas-kondusif](http://metro.djournalist.com/read/2020/07/01/15654/hut-bhayangkara-
ketua-dprd-sulsel-harap-situasi-kamtibmas-kondusif)

Rakyatku.com

[https://rakyatku.com/read/188987/innalillah-anggota-dprd-sulsel-ince-
langke-meninggal-dunia](https://rakyatku.com/read/188987/innalillah-anggota-dprd-sulsel-ince-
langke-meninggal-dunia)

[https://rakyatku.com/read/188988/tiba-tiba-jatuh-saat-bicara-dalam-rapat-
detik-detik-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-tutup-usia](https://rakyatku.com/read/188988/tiba-tiba-jatuh-saat-bicara-dalam-rapat-
detik-detik-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-tutup-usia)

<https://rakyatku.com/read/188529/oknum-anggota-dprd-sulsel-dilapor-ke-kejati-dugaan-penyelewengan-dana-bpnt>

<https://rakyatku.com/read/188076/silaturahmi-bersama-fraksi-golkar-dprd-sulsel-taufan-cerita-keterpilihan-dan-program>

<https://rakyatku.com/read/187721/rs-mengeluh-bpjs-telat-bayar-utang-dprd-sulsel-semoga-lebih-baik-lagi-dalam-jalankan-tugas>

<https://rakyatku.com/read/187210/terjadi-dualisme-kepemimpinan-di-puskud-dprd-sulsel-harap-bisa-dorong-perekonomian>

<https://rakyatku.com/read/186887/prof-rudy-dapat-dukungan-dari-dprd-sulsel-tuntaskan-covid-19-di-makassar>

<https://rakyatku.com/read/186686/hadiri-peringatan-hut-bhayangkara-ketua-dprd-sulsel-titip-harapan-ini>

Trotoar.id

<https://trotoar.id/2020/09/30/dprd-sulsel-sahkan-apbd-p-10-8-t/>

<https://trotoar.id/2020/09/30/sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-tes-massal/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/ini-kronogis-polisi-hambur-pengunjuk-rasa-di-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/aliansi-mahasiswa-pertanian-demo-kantor-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/demo-hari-tani-depan-dprd-sulsel-di-warnai-penangkapan-belasan-aktifis/>

<https://trotoar.id/2020/09/19/sekwan-dprd-sulsel-proses-usulan-pengunduran-diri-tiga-anggota-dewan/>

<https://trotoar.id/2020/09/16/ketua-dprd-sulsel-dukung-pasar-wisata-modern/>

<https://trotoar.id/2020/09/09/dprd-sulsel-tetapkan-7-komisioner-kpid-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/08/wafat-saat-rapat-banggar-di-dprd-sulsel-jenazah-ince-langke-disemayamkan-di-dprd/>

<https://trotoar.id/2020/09/08/breaking-news-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-pingsan-saat-bicara-di-rapat-banggar/>

<https://trotoar.id/2020/08/24/banggar-dprd-sulsel-minta-pemprov-narasikan-kua-ppas/>

<https://trotoar.id/2020/08/17/mentan-syl-serahkan-penghargaan-ke-wakil-ketua-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/08/14/tuntut-ruu-cilaka-dihentikan-buruh-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/08/13/ketua-dprd-sulsel-temui-pengunjuk-rasa/>

<https://trotoar.id/2020/08/13/mahasiswa-bulukumba-geruduk-kantor-dprd-sulsel-rapim-di-bubarkan/>

<https://trotoar.id/2020/07/27/ketua-dprd-sulsel-siap-sinergi-dengan-knpi-arham-basmin/>

<https://trotoar.id/2020/07/27/ketua-dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-bersinergi-bangun-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/07/15/ini-hasil-rdp-dprd-sulsel-soal-tambang-pasir-laut/>

<https://trotoar.id/2020/07/10/delapan-staf-dprd-sulsel-dinyatakan-reaktif/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/pimpinan-dprd-sulsel-sebut-belum-ada-lhp-dari-bpk/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/sekretariat-dprd-sulsel-kecurian-tiga-laptop-digondol-maling/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/dprd-sulsel-dukung-prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://trotoar.id/2020/07/03/tolak-ruu-hip-gabungan-ormas-cari-wakil-parpol-pengusul-di-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/07/02/ketua-dprd-sulsel-sosialisasi-perda-nomor-9-tahun-2016-dapat-antusias-warga-maros/>

<https://trotoar.id/2020/07/01/ikuti-upacara-hut-bhayangkara-ini-pesan-ketua-dprd-sulsel/>

IniKata.com

<https://inikata.com/2020/09/30/aliansi-pemuda-bone-menggugat-bawa-persoalan-program-paket-sembako-ke-dprd-sulsel/> 30 September 2020, 15:51

<https://inikata.com/2020/09/25/ketua-dprd-sulsel-sambangi-blok-hunian-perempuan-rutan-makassar/> 25 September 2020, 22:20

<https://inikata.com/2020/08/18/wakil-ketua-dprd-sulsel-syahr-terima-penghargaan-petani-porang-inspiratif-2020/> 18 Agustus 2020, 08:45

<https://inikata.com/2020/08/13/mahasiswa-bulukumba-berunjuk-rasa-di-dprd-sulsel-ini-tuntutannya/> 13 Agustus 2020, 21:31

<https://inikata.com/2020/08/07/komisi-e-dprd-sulsel-bahas-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2019/> 7 Agustus 2020, 07:48

<https://inikata.com/2020/07/28/knpi-arham-basmin-temui-ketua-dprd-sulsel-bahas-ini/> 28 Juli 2020, 08:25

<https://inikata.com/2020/07/21/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/> 21 Juli 2020, 08:23

<https://inikata.com/2020/07/10/dinkes-dan-sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-test-massal/> 10 Juli 2020, 11:42

<https://inikata.com/2020/07/08/pemprov-kembali-raih-wtp-ketua-dprd-sulsel-alhamdulillah/> 8 Juli 2020, 09:46

<https://inikata.com/2020/07/06/dprd-sulsel-temui-pj-walikota-makassar-bicara-soal-penanganan-covid-19/> 6 Juli 2020, 20:31

<https://inikata.com/2020/07/04/alianse-penjaga-gerbang-timur-indonesia-sambangi-dprd-sulsel-ini-tuntutannya/> 4 Juli 2020, 13:30

<https://inikata.com/2020/07/02/wakil-ketua-dprd-sulsel-ajak-masyarakat-dukung-polri-ciptakan-kamtibmas/> 2 Juli 2020, 07:22

Berita Sulsel

<https://mitrapol.com/2020/09/30/dprd-sulsel-gelar-raker-pansus-bahas-pemberian-insentif-dan-kemudahan-investasi/> 30 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/25/peringati-satu-tahun-masa-bakti-keanggotaan-dprd-provinsi-sulsel-anggota-kpp-kunjungi-rutan/>

25 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/15/jalin-sinergitas-dengan-legislatif-kapolda-irjen-merdisyam-kunjungi-dprd-provinsi-sulsel/> 15 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/14/sidang-paripurna-penandatanganan-nota-kesepakatan-bersama-dprd-dengan-gubernur-sulsel/> 14 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/09/meninggal-saat-hadiri-sidang-gubernur-kita-kehilangan-putra-terbaik-sulawesi-selatan/> 9 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/08/28/nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-tahun-anggaran-2021-ditandatangani-pemprov-dan-dprd-sulsel/> 28 Agustus 2020

<https://mitrapol.com/2020/07/20/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/> 20 Juli 2020

<https://mitrapol.com/2020/07/16/bahas-pulau-sangkarrang-komisi-d-dprd-sulsel-gelar-rpd/> 16 Juli 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : NURUL BAYYINAH M

Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tanjung Pattiro No. 18, Makassar

No. Hp : 0811 5861 666

Email : nurulbayyinah94@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Instansi	Tahun
Perguruan Tinggi	S1 Jurusan Jurnalistik, UIN Alauddin Makassar	2012-2016
Sekolah Menengah Atas	SMK Bajiminasa Makassar	2008-2011
Sekolah Menengah Pertama	MTs. Negeri Model Makassar	2005-2008
Sekolah Dasar	SDN Komp. Patompo II Makassar	1999-2005

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562
M A K A S S A R 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 97 /Set.DPRD.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : **Andi Asrul Sani, SH**
b. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I, III/d
c. Jabatan : Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
d. Unit Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
e. Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
f. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 59 Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **Nurul Bayyinah Muhrim, S. Sos**
b. Nomor Pokok : E022191024
c. Program : Strata Dua (S2)
d. Program Studi : Ilmu Komunikasi
e. Konsentrasi : Ilmu Komunikasi
f. Tempat Pendidikan : Pasca Sarjana UNHAS Makassar.
g. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian untuk Penyusunan Tesis "Analisis Penggunaan Media Online pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan" mulai tanggal 11 Februari 2021 - selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Februari 2021.

KASUBBAG TATA USAHA
DAN KEPEGAWIAN,



ANDI ASRUL SANI, SH

Pangkat / Penata Tk. I

Nip

: 19750128 200803 1001

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

NURUL BAYYINAH MUHRIM
PROGRAM MAGISTER (S2)
ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA <i>ONLINE</i> PADA HUMAS DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
--

Nama Informan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan/ Pekerjaan :

-
1. Bagaimana Humas dalam mengelola publikasi berita melalui media *online* pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?
Pertanyaan:
 - a. Bagaimana peran Humas sebagai sumber informasi dan publikasi di DPRD Sulawesi Selatan menurut anda?
 - b. Sutkan jenis informasi apa yang biasa dipublikasikan Humas DPRD Prov. Sulsel?
 - c. Apa saja ragam Informasi yang paling dominan dipublikasikan Humas DPRD Provinsi Sulsel?
 - d. Informasi tersebut dipublikasikan di jenis media-media apa saja, bisa anda sebutkan dan jelaskan yang paling dominan?
 - e. Mengenai media *online*, media *online* apa saja yang digunakan untuk publikasi saat ini dan mengapa menggunakan media *online* tersebut?

- f. Kapan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai mempublikasikan berita melalui media *online*?
 - g. Berapa jumlah pegawai yang bertanggung jawab pada publikasi berita di media *online*?
 - h. Bagaimana proses pengelolaan publikasi berita melalui media *online* dan website Sekretariat DPRD serta siapa-siapa orang Humas yang terlibat didalamnya?
 - i. Konten berita apa saja yang di share pada portal media *online* dan website? Adakah perbedaannya.
 - j. Menurut anda, mengapa Humas DPRD Prov Sulawesi Selatan memilih peran media *online* dalam membantu penyebaran dan pendistribusian informasi?
2. Mengapa Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak memaksimalkan publikasi pada media *online*?
- a. Sepanjang Juni – Agustus 2019 ada 8 portal media *online* dan 1 Web Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif memberitakan informasi dan publikasi kegiatan DPRD dengan total 111 berita, kalau di kalkulasikan sekitar 30 berita perbulannya. Apa menurut anda sudah cukup?
 - b. Berapa jumlah berita yang seharusnya diposting di media *online* perharinya menurut anda dan apa sudah sesuai targetnya?
 - c. Bisa anda sebutkan beberapa media *online* yang aktif mempublikasikan berita seputar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?

Pertanyaan Pendukung

- a. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti Bimtek atau Diklat Kehumasan?
- b. Apa faktor pendukung yang dihadapi oleh Humas DPRD Prov. Sulawesi Selatan dalam mempublikasikan berita melalui media *online* di era digital informasi?
- c. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh Humas DPRD Prov. Sulawesi Selatan dalam mempublikasikan berita melalui media *online* di era digital informasi?
- d. Apa yang Bapak/Ibu lakukan setelah mengalami kendala tersebut?

Pertanyaan tambahan untuk Pimpinan

(Sekretaris DPRD Prov. Sulsel, Kabag. Perundang-undangan dan Informasi, Kasubag. Humas, Protokol, dan Publikasi)

1. Menurut anda berita/konten dan informasi tentang apa yang mesti diberitakan oleh Humas?
2. Kalau untuk penggunaan media *online* sendiri untuk pemberitaan seputar apa?
3. Apakah Bapak pernah membaca berita tentang Humas DPRD Provinsi Sulsel di media *online*? Sebutkan beberapa media *online* tersebut yang anda ketahui.
4. Menurut anda apa saja faktor penghambat dalam penggunaan media *online* bagi Humas dalam menyebarkan informasi atau berita Provinsi Sulawesi Selatan?

Pertanyaan untuk publik

(Eksternal Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)

1. Sebutkan topik apa saja yang pernah anda baca ketika membaca berita seputar DPRD Prov. Sulsel?
2. Apakah jawaban diatas tersebut memberitakan hal yang sesuai dan aktual bagi anda?
3. Sebutkan media *online* yang paling sering digunakan untuk memperoleh pemberitaan seputar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah dari portal berita atau melalui web Sekretariat DPRD?
4. Mengapa anda memilih media tersebut?
5. Sejauhmana informasi itu penting untuk anda?

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Penulis berfoto bersama dengan Drs. M. Jabir, M.Si, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan usai melakukan wawancara



Gambar 2. Wawancara bersama Dra. Syamsiah, MM, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3. Wawancara bersama Mahyuddin, S.Sos, M.Si, Kepala Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4. Wawancara bersama Asmira AM, SE, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4. Wawancara bersama Achmad Adam Abdullah, Staf Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4. Wawancara bersama Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 5. Wawancara bersama Andi Ina Kartika Sari,
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan